LAPORAN AKHIR MAGANG

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2017 – 2021

ADIRA NISRINA SETYANINGSIH

NIM: 19312212

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2022

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Adira Nisrina Setyaningsih

NIM : 19312212

Jurusan : S1 Akuntansi

Fakultas : Bisnis dan Ekonomika

Judul : Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2017-2021

Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah ini bebas plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti plagiat dalam karya ilmiah ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Januari 2023

ADIRA NISRINA SETYANINGSIH

LAPORAN AKHIR MAGANG

PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI

PERWAKILAN PROVINSI DIY

(Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2017-2021)

Disusun Oleh :

ADIRA NISRINA SETYANINGSIH

NIM : 19312212

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal ....5 Januari 2023.....

Dosen Pembimbing

MAHMUDI, Dr., S.E., M.Si., Ak.

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR MAGANG

TUGAS AKHIR BERJUDUL

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2017 – 2021

Disusun Oleh : ADIRA NISRINA SETYANINGSIH

Nomor Mahasiswa : 19312212

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari, tanggal: Selasa, 07 Februari 2023

Penguji/ Pembimbing TA : Mahmudi, Dr. S.E., M.Si., Ak., CA, CMA. .....

Penguji : Suwaldiman, S.E., M.Accy, Akt., CMA, CA. .....

Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFrA, CertIPSAS.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Adira Nisrina Setyaningsih

NIM : 19312212

Jurusan : S1 Akuntansi

Fakultas : Bisnis dan Ekonomika

Judul : Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2017-2021

Dengan ini menyatakan bahwa:

1) Laporan akhir magang ini merupakan hasil karya penulisan saya sendiri tanpa ada campur tangan oleh pihak lain, selain pembimbing dan narasumber terkait.
2) Laporan akhir magang ini secara keseluruhan belum pernah dipublikasikan dalam bentuk apapun baik di Universitas Islam Indonesia, maupun di perguruan tinggi lainnya.
3) Dalam laporan akhir magang ini tidak terdapat karya tulis atau pendapat yang telah diklaim oleh orang lain kecuali telah dicantumkan sebagai rujukan dalam penulisan laporan dan tercantum pada daftar pustaka.

Yogyakarta, 5 Januari 2023

ADIRA NISRINA SETYANINGSIH

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadirat Allah Subhannahu Wata'ala karena atas berkat dan limpahan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik laporan magang yang berjudul **"Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2017-2021".** Laporan ini disusun sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana (S1) pada program studi Akuntansi di Universitas Islam Indonesia (UII), serta sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan Kegiatan Program Magang di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang dilaksanakan pada tanggal 5 September 2022 s.d. 5 Desember 2022.

Penulis menyadari tanpa bantuan dari berbagai pihak, kegiatan program magang dan penyusunan laporan ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. Maka dari itu, pada kesempatan ini penulis dengan ketulusan dan kerendahan hati ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1) Bapak Widhi Widayat, S.E., M.Si., CA, CSFA, Ak. selaku Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi DIY;
2) Ibu Bernadetta Arum Dati, S.E., M.M., Ak. selaku Kepala Subauditorat BPK Perwakilan Provinsi DIY;
3) Ibu Ester Arie Noerachmawati, S.E., M.M. selaku Kepala Subbagian Humas dan TU BPK Perwakilan Provinsi DIY;

4) Ibu Farida Sofia Irawati S.E., Ak., M.Acc. Pemeriksa Ahli Madya pada BPK Perwakilan Provinsi DIY selaku mentor pertama di Subauditorat yang selalu membimbing dan memberikan banyak ilmu baru yang bermanfaat bagi penulis;
5) Ibu Anjari Styoning Tyas S.E., M.Ec. Dev., Ak. selaku mentor kedua di Subbagian Humas yang bersedia membantu penulis selama proses pengambilan data penelitian;
6) Bapak Mahmudi, Dr., S.E., M.Si., Ak. selaku dosen pembimbing yang telah berkenan memberikan bimbingan, pengarahan, dukungan, dan motivasi dengan penuh kesabaran serta ketulusan selama proses pengerjaan laporan magang ini;
7) Seluruh keluarga besar BPK RI Perwakilan Provinsi DIY khususnya Subauditorat dan Subbagian Humas yang telah banyak membantu penulis dalam memperoleh data yang diperlukan;
8) Yumna Rizqi Ramadhan, Rahmat Gangsar Rizky, dan Rizqi Akbar Romadhoni, selaku teman seperjuangan penulis selama melewati masa magang di BPK RI Perwakilan Provinsi DIY;
9) Kedua orang tua penulis, Bapak Didik Supriyadi S.Hut dan Ibu Arum Juliyanti Rahmah S.P yang tiada henti memberikan doa, motivasi, dan semangat untuk penulis. Serta adik tersayang, Muhammad Atha Naufalardi yang selalu memberikan semangat dan menghibur penulis;
10) Om Bawono Yudyanto Arief Kusumo S.E., CFE., Ak., M.Ak., CA. selaku om penulis yang senantiasa memberikan motivasi, arahan, serta petunjuk dalam penyusunan laporan ini;

11) Sahabat-sahabat tersayang, Lala, Livi, Alin, Rani, Hasna, Rahmi, serta teman-teman terdekat penulis dalam satu prodi, Daffa, Aldi, Alvian, Nicho, dan Alan;
12) Serta semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu-persatu atas bantuannya, sehingga penyusunan laporan magang ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa laporan ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun kami butuhkan demi kesempurnaan laporan ini.

Demikian laporan ini disusun, atas segala perhatian dan bantuannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Penulis,

ADIRA NISRINA SETYANINGSIH

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME……...ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING iii
BERITA ACARA TUGAS AKHIR iv
PERNYATAAN ORISINALITAS v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xi
DAFTAR GRAFIK xii

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Perumusan Masalah 3
1.3 Tujuan Penelitian 3
1.4 Manfaat Penelitian 4
1.5 Sistematika Laporan 5

BAB II KAJIAN PUSTAKA 7
2.1 Landasan Teori 7
2.1.1 Otonomi Daerah 7
2.1.2 OtonomiDaerah Istimewa Yogyakarta 8
2.1.3 Kinerja 8
2.1.4 Kinerja Keuangan 9
2.1.5 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 10
2.1.6 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 11
2.1.7 Kinerja Keuangan APBD 12
2.2 Kajian Terdahulu 19

BAB III METODE PENELITIAN 24
3.1 Jenis Penelitian 24
3.2 Sumber dan Data Penelitian 24
3.3 Teknik Pengumpulan Data 25
3.4 Teknik Analisis Data 25

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 27
4.1 Profil BPK RI Perwakilan Provinsi DIY 27
4.2 Aktivitas Magang 29
4.3 Ketercapaian Pelaksanaan Magang 33
4.4 Data dan Output yang Didapatkan 38

4.5 Gambaran Umum Daerah ……..…. 39

4.5.1 Kondisi Geografis 39
4.5.2 Data Khusus 39
4.5.3 Pembahasan 40
4.5.4 Ringkasan Hasil Penelitian 63

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 64
5.1 Kesimpulan 64
5.2 Saran 66

DAFTAR PUSTAKA 69
LAMPIRAN 72
DOKUMENTASI GAMBAR …… 75
JADWAL KEGIATAN MAGANG …… 82
QR CODE KEGIATAN …….. 84

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal 15

Tabel 2.2 Kriteria Penilaian Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah..... 15

Tabel 2.3 Kriteria Penilaian dan Kinerja Efektivitas 16

Tabel 2.4 Kriteria Rasio Keserasian Belanja Daerah..... 18

Tabel 4.1 Realisasi Anggaran Pendapatan, Belanja, Pembiayaan Bersih, SILPA Pemprov DIY 39

Tabel 4.2 Varians Pemprov DIY 40

Tabel 4.3 Analisis Pertumbuhan Pendapatan Pemprov DIY..... 43

Tabel 4.4 Tingkat Inflasi Pemprov DIY..... 43

Tabel 4.5 Rasio Derajat Desentralisasi Pemprov DIY 45

Tabel 4.6 Rasio Ketergantungan Keuangan Pemprov DIY..... 48

Tabel 4.7 Rasio Efektivitas PAD Pemprov DIY 50

Tabel 4.8 Analisis Varians Belanja Daerah Pemprov DIY 52

Tabel 4.9 Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah Pemprov DIY..... 54

Tabel 4.10 Analisis Rasio Belanja Operasi Pemprov DIY 56

Tabel 4.11 Analisis Rasio Belanja Modal Pemprov DIY 56

Tabel 4.12 Analisis Efisiensi Belanja Daerah Pemprov DIY..... 59

Tabel 4.13 SILPA Pemerintah Provinsi DIY 62

Tabel 4.14 Ringkasan Analisis Kinerja Keuangan Pemprov DIY..... 63

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 Varians Pendapatan Pemprov DIY 41
Grafik 4.2 Pertumbuhan Pendapatan Pemprov DIY 44
Grafik 4.3 Derajat Desentralisasi Pemprov DIY..... 46
Grafik 4.4 Rasio Ketergantungan Keuangan Pemprov DIY..... 49
Grafik 4.5 Rasio Efektivitas PAD Pemprov DIY 50
Grafik 4.6 Varians Belanja Daerah Pemprov DIY..... 53
Grafik 4.7 Pertumbuhan Belanja Daerah Pemprov DIY 54
Grafik 4.8 Keserasian Belanja Daerah Pemprov DIY..... 57
Grafik 4.9 Efisiensi Belanja Daerah Pemprov DIY 60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki status istimewa dan merupakan provinsi tertua kedua setelah Jawa Timur. Berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2014, otonomi merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom dalam mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Di dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa daerah provinsi yang memiliki kedudukan sebagai daerah otonom otomatis menjadi wilayah administratif, sehingga memiliki kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab terhadap pemerintah daerah secara proporsional. Pemberian wewenang yang lebih luas mewajibkan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk meningkatkan pelayanan, dan kesejahteraan masyarakat (Budiarso et al., 2015).

Menurut Mahmudi (2010), tujuan pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah. Dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi daerah tersebut, diperlukan kewenangan serta tanggung jawab yang luas dan berimbang antara keuangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka diperlukan adanya sistem desentralisasi secara transparan, efektif, dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas. Dalam rangka perwujudan

transparansi dan akuntabilitas keuangan negara, diperlukan media tertentu. Salah satu alat yang dijadikan media tersebut adalah laporan keuangan pemerintah daerah, khususnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangannya tersebut untuk diperiksa oleh BPK. Hal tersebut sesuai dengan Undang–Undang No.15 Tahun 2004, yaitu BPK memperluas tugasnya dengan melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan pemerintah daerah. Melalui pemeriksaan kinerja, BPK dapat menilai aspek 3E (Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas) atas kegiatan atau pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Penilaian tersebut secara umum mencakup apakah pemerintah daerah berhasil dalam menjalankan tugasnya atau tidak. Penilaian tersebut menjadi indikator bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki kinerja anggaran dan pengelolaan keuangan daerahnya. Hal ini sangat penting untuk pelaksanaan otonomi daerah dalam mewujudkan desentralisasi yang luas dan berimbang. Adanya perencanaan pengeluaran yang berhubungan dengan kinerja juga dapat meningkatkan kinerja anggaran daerah.

Kinerja keuangan daerah atau kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan satu periode anggaran. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja

keuangan adalah sebuah gambaran kondisi keuangan sebuah instansi yang diukur berdasarkan cara dan kriteria tertentu yang dapat berupa realisasi pendapatan dan belanja yang disusun berdasarkan basis akrual yang menghasilkan sebuah kesimpulan akan suatu instansi dalam mengelola keuangan (Halim, 2012).

Dasar yang digunakan dalam pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIY pada penelitian ini yaitu mengkombinasikan analisis perbandingan laporan keuangan dari tahun 2017 s.d. 2021, analisis *trend*, dan analisis rasio keuangan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis akan melakukan penelitian mengenai kinerja keuangan dengan mengambil judul **"Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2017-2021".**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017 s.d. 2021.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017 s.d. 2021 berdasarkan perhitungan rasio dan analisis yang terdiri dari analisis varians pendapatan daerah, analisis pertumbuhan pendapatan daerah, rasio derajat desentralisasi, rasio

ketergantungan keuangan daerah, rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), analisis varians belanja daerah, analisis pertumbuhan belanja daerah, analisis keserasian belanja daerah, dan analisis efisiensi belanja.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini mencakup:

1.1.1 Manfaat Teoritis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah literatur serta data bagi banyak pihak yang berkaitan.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam menambah khazanah bagi seluruh sivitas akademik, khususnya Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

1.1.2 Manfaat Praktis

a. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi hasil kinerja pemerintah berdasarkan perhitungan rasio dan analisis hasil penelitian ini, terutama bagi Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta wawasan berkaitan dengan kegiatan kinerja keuangan pemerintah daerah di lapangan sebagai bentuk pengaplikasian ataupun perbandingan dengan ilmu yang telah dipelajari selama kuliah.

c. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan pembelajaran bagi para sivitas akademik, khususnya yang bekerja pada bidang akuntansi pemerintahan.

d. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan acuan hasil kinerja Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka pengoptimalan potensi serta sumber daya yang dimiliki.

1.5 Sistematika Laporan

Laporan ini terbagi dalam lima bab yang kemudian terbagi dalam beberapa subbab yang mencakup:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menyajikan latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, secara garis besar.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas mengenai kerangka teoritis yang dijadikan sebagai landasan penelitian untuk mengevaluasi kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi otonomi daerah, otonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta, kinerja, kinerja keuangan, kinerja keuangan pemerintah daerah, APBD, kinerja APBD, dan telaah kajian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai metodologi penelitian yang akan digunakan mencakup jenis penelitian, sumber dan data penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai profil tempat magang, aktivitas magang, ketercapaian pelaksanaan magang, data dan output yang diperoleh, penyajian serta deskripsi data hasil penelitian yang menguraikan objek penelitian dan pembahasan instrumen penelitian yang kemudian diuraikan berdasarkan pengolahan data yang ada.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan hasil penelitian, dan saran untuk Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam memperbaiki kinerja keuangannya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Otonomi Daerah

Otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Seiring berjalannya waktu, karena Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka digantikan dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2014.

Menurut Kansil (2008), otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur serta mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan perundang-undangan yang masih berlaku. Kewenangan tersebut oleh pemerintah pusat diserahkan secara formal kepada pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014. Penyerahan kewenangan berarti adanya keleluasaan untuk menggunakan dana, baik yang berasal dari PAD sendiri maupun dari pusat sesuai dengan keperluan daerah tanpa adanya campur tangan dari pemerintah pusat.

Inti pelaksanaan otonomi daerah adalah keleluasaan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar pra-karsa, kreativitas dan peran serta aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya masing-masing.

2.1.2 Otonomi Daerah Istimewa Yogyakarta

Di Indonesia terdapat beberapa daerah yang diatur dengan otonomi khusus atau bersifat sebagai daerah istimewa, salah satunya adalah DIY. Keistimewaan tersebut didasarkan karena kedudukannya yang khusus. DIY memiliki kewenangan dalam mengatur keistimewaannya dengan Peraturan Daerah Istimewa. Kewenangan Istimewa tersebut merupakan wewenang tambahan tertentu yang dimiliki DIY selain wewenang yang telah ditentukan dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah di DIY dilaksanakan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kualitas, dan kemampuan pengelolaan sumber keuangan daerah, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

2.1.3 Kinerja

Menurut Mangkunegara (2002), kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai seseorang atau pegawai yang menghasilkan output, efisien, efektivitas yang berkaitan dengan produktivitas secara kualitas maupun kuantitas sesuai dengan apa yang dipertanggungjawabkan. Sedangkan menurut Sugiyarso (2005) menyatakan bahwa kinerja merupakan tingkat pencapaian dan tujuan perusahaan, tingkat pencapaian pelaksanaan tugas secara aktual. Kinerja juga dapat diartikan sebagai prestasi yang dicapai perusahaan dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan organisasi. Selain itu, kinerja digambarkan sebagai suatu kondisi dimana pihak-pihak tertentu perlu mengetahui tingkat pencapaian suatu hasil yang

dicapai instansi atau organisasi yang dihubungkan dengan visi yang diemban untuk mengetahui dampak positif dan negatif yang dihasilkan dari suatu kebijakan operasional yang diambil.

2.1.4 Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan salah satu ukuran yang digunakan untuk memastikan kemampuan daerah dalam melaksanakan kemampuan daerah dalam melaksanakan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar untuk mempertahankan layanan yang diinginkan, dimana penilaian yang lebih tinggi menjadi tuntutan yang harus dipenuhi agar pihak eksternal memutuskan untuk berinvestasi di dalam daerah (Mardiasmo, 2009). Pengukuran kinerja yang bersumber dari informasi finansial seperti laporan keuangan, dapat diukur menggunakan anggaran yang telah disusun. Sawir (2005) mendefinisikan kinerja keuangan sebagai penilaian kondisi keuangan dan prestasi organisasi, analisis memerlukan beberapa tolok ukur yang digunakan adalah rasio dan indeks.

Kinerja keuangan merupakan hasil dari realisasi pendapatan dan belanja yang telah disusun dan diukur berdasarkan basis akrual. Sehingga kinerja keuangan dapat diartikan sebagai suatu gambaran kondisi keuangan sebuah organisasi atau instansi yang diukur menggunakan cara tertentu dan menghasilkan sebuah kesimpulan mengenai keberhasilan organisasi atau instansi dalam mengelola keuangan.

2.1.5 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah (Abdul, 2014). Keuangan daerah memiliki arti penting dalam rangka pelaksanaan pemerintahan serta kegiatan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat daerah. Maka dari itu, keuangan daerah perlu untuk diberdayakan dan dikembangkan.

Dikutip dari Kamus Akuntansi Manajemen, kinerja keuangan pemerintah daerah didefinisikan sebagai aktivitas terukur dari suatu entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan. Menurut Sucipto, (2013), kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan hasil *output* pencapaian kinerja pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya guna pembangunan daerah yang dicantumkan dalam laporan anggaran dan realisasi dalam bentuk nominal maupun realisasi pembangunan. Mardiasmo (2009) memiliki pendapat bahwa pengukuran kinerja sektor publik atau instansi pemerintah daerah memiliki tujuan untuk menentukan pelayanan yang lebih baik untuk publik.

2.1.6 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Abdul (2014), APBD merupakan rencana keuangan pemerintah daerah yang menggambarkan perkiraan pengeluaran untuk membiayai kegiatan dan proyek daerah selama periode satu tahun dan menggambarkan perkiraan dan sumber penerimaan daerah untuk menutupi pengeluaran.

APBD bagi pemerintah memiliki manfaat sebagai rencana perkiraan tinggi biaya pemasukan dan pengeluaran anggaran dalam kegiatan dan proyek dalam periode anggaran satu tahun. APBD sebagai anggaran daerah memiliki unsur-unsur yang meliputi: rencana, jenis, dan bentuk proyek dalam bentuk angka maupun uraian dalam satu periode, serta batas minimal target dan batas maksimal target pendanaan maupun pengeluaran aktivitas.

Pada saat ini, APBD terbaru terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. APBD pendapatan dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu PAD, Dana Perimbangan, dan Pendapatan Lain-Lain Daerah yang Sah. APBD belanja dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu belanja tidak langsung yang berisi belanja pegawai, belanja subsidi, belanja bunga, belanja bantuan sosial, belanja tidak terduga, dan hibah. Serta belanja langsung yang berisi belanja pegawai honorarium dan penghasilan yang berkaitan dengan pelaksanaan barang dan jasa serta belanja modal. Sedangkan untuk APBD pembiayaan terbagi berdasarkan sumber biaya, yaitu sumber biaya penerimaan dan sumber biaya pengeluaran.

Berdasarkan penetapan Menteri Keuangan, sebagai Daerah Istimewa, Pemprov DIY dapat menganggarkan penerimaan Dana Keistimewaan pada Pendapatan Daerah dalam APBD. Dana Keistimewaan merupakan dana yang

berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang dialokasikan khusus untuk mendanai Kewenangan Istimewa. Proses penurunan pencairan Dana Istimewa harus melalui berbagai tahapan dan diperlukan pembuatan program-program yang berkaitan dengan keistimewaan Yogyakarta.

2.1.7 Kinerja Keuangan APBD

Mahmudi (2019) dalam bukunya yang berjudul "Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" melakukan analisis kinerja keuangan APBD yang dibagi dalam tiga bagian, yaitu:

1. Analisis Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah

Secara umum dinilai berdasarkan besar kecilnya antara realisasi pendapatan dan anggarannya. Salah satu indikator kerja dikatakan baik jika realisasinya melampaui target anggaran yang sudah ditentukan. Selain itu, dapat dilihat dari komponen pendapatan lain yang lebih berpengaruh. Berdasarkan realisasi anggaran, kita dapat melakukan analisis kinerja keuangan pendapatan daerah dengan cara, sebagai berikut:

1) Analisis Varians Pendapatan Daerah

Analisis varians pendapatan daerah dapat dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan, biasanya selisih anggaran sudah diinformasikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) oleh pemerintah daerah. Selisih lebih realisasi pendapatan dikatakan menguntungkan *(favourable variance)*, sedangkan selisih kurang dikatakan tidak menguntungkan *(unfavourable variance)* (Mahmudi, 2019).

Hasil selisih tersebut dapat digunakan untuk memberikan informasi bagi pengguna dalam menganalisis kinerja pendapatan. Anggaran pendapatan dijadikan sebagai target minimal yang harus diperoleh oleh pemerintah daerah. Sehingga pemerintah daerah dapat dikatakan memiliki kinerja pendapatan yang baik jika mampu memperoleh pendapatan melebihi jumlah target anggaran yang sudah ditentukan, begitu sebaliknya.

2) Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Analisis ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah kinerja keuangan APBD pemerintah daerah dalam tahun anggaran tersebut mengalami peningkatan (pertumbuhan positif) atau penurunan (pertumbuhan negatif) dari periode sebelumnya.

Jika kinerja keuangan APBD pemerintah daerah mengalami peningkatan (pertumbuhan) ini menandakan bahwa kinerja keuangan pada periode tersebut baik (positif). Namun jika sebaliknya, kinerja keuangan mengalami penurunan, maka hal tersebut menandakan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah pada periode anggaran tersebut buruk atau tidak dapat mencapai target.

Pertumbuhan pendapatan daerah diharapkan dapat mengimbangi laju inlasi. Selain mempertimbangkan faktor inflasi, penetapan target pertumbuhan pendapatan juga harus mempertimbangkan asumsi anggaran yang lain, sebagai contoh kurs rupiah, harga minyak, dan sebagainya.

3) Analisis Rasio Keuangan

a. Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio ini dijadikan sebagai ukuran atas kewenangan serta tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam mengelola dan mengoptimalkan pendapatan yang diperoleh. Indikator keberhasilan daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi dapat ditunjukkan dengan tingginya PAD. Semakin tinggi PAD yang dihasilkan oleh pemerintah daerah, maka semakin baik kemampuan daerah dalam melaksanakan desentralisasi.

Pada dasarnya, rasio ini digunakan untuk menilai derajat desentralisasi dengan kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Tingkat desentralisasi fiskal merupakan ukuran untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kemandirian fiskal merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintah daerah, tanpa ketergantungan bantuan dari luar, termasuk dari pemerintah pusat (Bisma & Susanto, 2010).

Adapun kriteria penilaian untuk menetapkan rasio desentralisasi fiskal pemerintah daerah dapat ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal

Persentase PAD terhadap Total Penerimaan Daerah	Tingkat Desentralisasi Fiskal
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
> 50,00	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM (1991)

b. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah dapat dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi nilai rasio ini, maka semakin tinggi juga tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap penerimaan pusat atau provinsi (Mahmudi, 2010).

Adapun kriteria penilaian untuk menetapkan ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat atau provinsi dapat ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Kriteria Penilaian Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah

Persentase Pendapatan Transfer terhadap Total Penerimaan Daerah	Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah
0,00 – 10,00	Sangat Rendah
10,01 – 20,00	Rendah
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Tinggi
> 50,00	Sangat Tinggi

Sumber: Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM (1991)

c. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Mahmudi (2019), rasio efektivitas pendapatan asli daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan.

PAD dapat dikategorikan efektif apabila rasionya dapat mencapai minimal sebesar 100%. Sehingga, semakin tinggi rasio efektivitasnya, maka semakin baik kemampuan daerah dalam menjalankan tugasnya.

Adapun kriteria penilaian untuk menetapkan efektivitas PAD dapat ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Kriteria Penilaian dan Kinerja Efektivitas

Rasio Efektivitas	Kriteria Efektivitas
>100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
75% - 89%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi (2019)

2. Analisis Kinerja Keuangan Belanja Daerah

Analisis ini penting untuk dilaksanakan dengan tujuan untuk mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah. Kinerja keuangan yang dinilai mencakup apakah pemerintah daerah menggunakan APBD-nya secara ekonomis, efektif, dan efisien. Selain itu juga menilai apakah pemerintah daerah dalam penganggarannya telah melakukan efisiensi anggaran, seperti menghindari pengeluaran yang tidak diperlukan dan tidak tepat sasaran.

Penilaian kinerja keuangan belanja daerah dapat dikatakan bagus dan baik, jika realisasinya lebih rendah dari jumlah yang telah dianggarkan. Dalam

kaitannya dengan belanja daerah, penting untuk melakukan analisis keserasian belanja. Hal ini penting untuk dilakukan karena berkaitan dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilisasi. Analisis kinerja anggaran belanja daerah, dapat dilakukan dengan cara:

1) Analisis Varians Belanja Daerah

Analisis ini merupakan hasil dari selisih antara realisasi belanja dan anggaran dengan tujuan untuk mengetahui hasil besarnya varians antara realisasi dan anggaran belanja yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Hasil varians dapat dikatakan baik, jika pemerintah daerah dapat melakukan efisiensi pada belanja daerah. Namun jika sebaliknya, maka terdapat indikasi bahwa kinerja keuangan belanja daerah tidak baik. Hal ini biasanya dikarenakan jumlah realisasi belanja daerah lebih besar dari jumlah yang telah dianggarkan.

2) Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah

Analisis ini digunakan untuk mengevaluasi atau mengetahui pertumbuhan belanja daerah dari tahun ke tahun, apakah meningkat atau menurun. Pada umumnya, pertumbuhan belanja daerah bersifat positif. Hal ini memiliki arti bahwa belanja daerah mengalami kenaikan pada setiap periodenya. Alasan dibalik hal tersebut dapat dikarenakan adanya penyesuaian terhadap inflasi, perubahan kurs rupiah, perubahan jumlah cakupan layanan, dan cakupan makro ekonomi. Adanya pertumbuhan

belanja daerah harus dapat diimbangi dengan peningkatan pendapatan daerah.

3) Analisis Keserasian Belanja Daerah

Analisis rasio ini merupakan gambaran yang dapat menunjukkan kinerja pemerintah daerah dalam memprioritaskan alokasi dana belanja daerah secara optimal. Hal ini sesuai dengan fungsi anggaran yaitu sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilitas. Cara melakukan analisis ini dengan membandingkan antara analisis belanja operasi terhadap total belanja serta analisis belanja modal terhadap total belanja.

Adapun kriteria penilaian secara umum untuk menetapkan rasio keserasian belanja daerah ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.4 Kriteria Rasio Keserasian Belanja Daerah

Proporsi	Persentase (%)
Belanja Operasi	60-90
Belanja Modal	5-20

Sumber: Mahmudi (2019)

4) Analisis Efisiensi Belanja Daerah

Analisis ini dilakukan dengan tujuan sebagai tolok ukur dari tingkat penghematan anggaran yang dapat dilakukan pemerintah daerah pada periode tahun tersebut. Analisis ini bersifat relatif, karena tidak memiliki standar baku dalam pengukurannya. Namun, efisiensi anggaran belanja masih dapat dilakukan dengan menggunakan rasio efisiensi. Jika rasio efisiensi tidak mencapai 100%, maka pemerintah dinilai telah efisien dalam

melaksanakan belanja daerah. Apabila sebaliknya, maka pemerintah dinilai telah melakukan pemborosan anggaran. Sehingga dapat disimpulkan, jika realisasi belanja lebih kecil nilainya dibandingkan realisasi anggaran, maka pemerintah daerah dianggap mampu melaksanakan efisiensi belanja daerah.

3. Analisis Kinerja Keuangan Pembiayaan Daerah

Analisis ini dilakukan pada pola anggaran pemerintah daerah dengan tujuan untuk mengetahui kebijakan dan memprediksi kebijakan anggaran pemerintah daerah. Salah satu bagian dari pembiayaan daerah adalah SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) yang juga termasuk dalam struktur APBD. Keberadaan SILPA menjadi salah satu indikator dari kinerja keuangan APBD yang baik pada tahun anggaran yang bersangkutan.

Penilaian baik dan buruknya kinerja keuangan APBD dapat dilihat melalui kinerja keuangan pendapatan daerah, kinerja keuangan belanja daerah, serta kinerja keuangan pembiayaan daerah yang dapat mencapai nominal angka yang sudah ditargetkan. Jika sudah mencapai atau bahkan melampaui target, maka kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dikatakan baik dalam pengembangan dan pengelolaan daerah.

2.2 Kajian Terdahulu

APBD merupakan wujud nyata dari pengelolaan keuangan daerah. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah, pengelolaan keuangan daerah harus dikelola secara efektif, efisien, ekonomis, transparan, serta

berakuntabilitas. Salah satu indikator untuk menilai kinerja keuangan daerah adalah analisis rasio keuangan.

Pada tahun 2018, Putri (2018) melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui kinerja keuangan daerah Provinsi DIY tahun 2012-2016. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, dimana data yang digunakan berupa data sekunder berupa APBD Pemprov DIY Periode 2012-2016. Data tersebut dianalisis menggunakan rasio keuangan yang meliputi analisis varians, derajat desentralisasi, rasio kemandirian, rasio ketergantungan, rasio keserasian, analisis pertumbuhan, dan analisis efisiensi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah Pemprov DIY baik. Ditunjukkan dengan rata-rata analisis varians pendapatan yang sangat efektif. Derajat desentralisasi baik, rasio kemandirian delegatif, rasio ketergantungan sangat tinggi, analisis pertumbuhan pendapatan positif, analisis varians belanja baik, rasio belanja modal rendah, rasio belanja operasional tinggi, analisis pertumbuhan belanja positif, dan analisis efisiensi belanja sangat efisien.

Dua tahun setelah penelitian di atas, Wardani (2020) melakukan penelitian dengan tujuan untuk menganalisis apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di DIY pada tahun 2013-2017. Variabel yang digunakan adalah rasio efektivitas APBD, rasio efisiensi APBD, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio pertumbuhan PAD, rasio derajat desentralisasi fiskal, dan rasio keselarasan. Sampel dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di DIY. Data tersebut merupakan data sekunder yang diperoleh dari BPK Perwakilan Provinsi DIY. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan kinerja keuangan pemerintah

kabupaten/kota di DIY jika dilihat dari rasio kemandirian dan rasio keselarasan. Sedangkan jika dilihat dari rasio efektivitas APBD, efisiensi APBD, rasio pertumbuhan PAD dan rasio derajat desentralisasi fiskal tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan.

Di tahun yang sama, Atmaja (2020) melakukan penelitian dengan tujuan untuk menganalisis serta mengetahui bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi DIY pada tahun 2014-2018 yang dilakukan dengan menggunakan analisis rasio keuangan yaitu: 1) Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, 2) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, 3) Rasio Aktivitas Keuangan Daerah, 4) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, 5) Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan pengumpulan datanya menggunakan metode pengumpulan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi DIY yang dilihat dari 1) Rasio Efektivitas PAD rata-rata sudah tergolong efektif, 2) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah rata-rata sudah tergolong efisien, 3) Rasio Aktivitas Keuangan Daerah menunjukkan bahwa alokasi dana masih diprioritaskan untuk kebutuhan Belanja Operasional daripada Belanja Modal, 4) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah rata-rata masih tergolong rendah dan masuk dalam pola hubungan konsultatif, 5) Rasio Pertumbuhan PAD menunjukkan pertumbuhannya positif meskipun hasilnya fluktuatif.

Masih di tahun yang sama, Rakadewa (2020) melakukan penelitian dengan tujuan untuk melihat kinerja keuangan daerah di DIY dari empat pemerintah

kabupaten dan satu pemerintah kota selama tahun 2018-2020, yang meliputi Analisis Varians Pendapatan Daerah, Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah, Rasio Varians Belanja Daerah, Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah, Analisis Keserasian Belanja Daerah, dan Rasio Varians Belanja Daerah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah DIY secara umum dikatakan cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata varian pendapatan daerah yang cenderung bernilai negatif terutama di daerah Kota Yogyakarta, Gunungkidul, dan Kulon Progo. Pertumbuhan pendapatan daerah rata-rata (positif) 4,61%. Rasio derajat desentralisasi menunjukkan rata-rata 24,08%. Rasio ketergantungan sangat tergantung dengan rata-rata di atas 10% yakni 58,36%. Rasio efektivitas pajak lebih besar dari 100% yakni dengan rata-rata 106%. Kinerja keuangan belanja daerah secara umum dikatakan baik dapat dilihat dari varians belanja daerah rata-rata bernilai negatif. Pertumbuhan belanja daerah mengalami pertumbuhan dengan rata-rata pertumbuhan 0,85%. Keserasian belanja daerah dapat dikatakan bahwa Pemerintah DIY mengalokasikan belanjanya sebagian besar pada belanja operasi dengan rata-rata 71,74% dibandingkan dengan belanja modal 27,88%, dan efisiensi belanja daerah berada di bawah 100% dengan rata-rata 91,63%.

Penelitian terakhir, yaitu Hatmoko (2021) melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan kinerja keuangan daerah pada Pemprov DIY sebelum dan sesudah menerima dana keistimewaan melalui analisis rasio keuangan serta bagaimana hubungan dana keistimewaan dengan rasio

keuangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode campuran eksplanatoris sekuensial. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah dalam mengelola anggaran sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk merumuskan perhatian terhadap masalah yang dihadapi, di mana data yang dikumpulkan kemudian disusun dan dianalisis sehingga dapat memberikan informasi.

Pada penelitian ini, data keuangan yang dihitung adalah kinerja Pemprov DIY pada tahun anggaran 2017 s.d. 2021. Subjek penelitian ini adalah kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan objek penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran pendapatan belanja daerah Provinsi DIY tahun 2017 s.d. 2021 yang terdapat pada LHP LKPD Pemprov DIY yang telah diaudit BPK.

3.2 Sumber dan Data Penelitian

Sumber data yang akan digunakan yaitu data sekunder. Data sekunder merupakan data penelitian yang sifatnya tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah LRA APBD Pemprov DIY yang diperoleh dari LHP LKPD Pemprov DIY *Audited* BPK, yang berfokus pada perhitungan APBD Pemprov DIY tahun anggaran 2017 s.d. 2021. Data tersebut diperoleh melalui Bagian Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) BPK RI Perwakilan Provinsi DIY. Selain itu, sumber data juga diperoleh melalui studi kepustakaan dan referensi-referensi yang berkaitan dengan penelitian.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan metode observasi. Metode observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan secara langsung dan melakukan pencatatan serta perhitungan sistematis terhadap objek penelitian. Objek pada penelitian ini yaitu perhitungan APBD Pemprov DIY pada tahun anggaran 2017 s.d. 2021. Observasi dapat dilakukan dengan cara *library research* dan *field research*.

3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis yaitu metode kuantitatif. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

1. Analisis Varians Pendapatan Daerah

$$\text{Analisis Varians} = \frac{Realisasi\ Pendapatan\ Tahun_t}{Anggaran\ Pendapatan\ Tahun_t} \times 100\%$$

2. Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah

$$\text{Analisis Pertumbuhan} = \frac{Pend.Thn_t - Pend.Thn_{t-1}}{Pend.Thn_{t-1}} \times 100\%$$

3. Rasio Derajat Desentralisasi

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{Pendapatan\ Asli\ Daerah}{Total\ Pendapatan\ Daerah} \times 100\%$$

4. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

$$\text{Rasio Ketergantungan Keu. Daerah} = \frac{Pendapatan\ Transfer}{Total\ Pendapatan\ Daerah} \times 100\%$$

5. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ PAD}{Target\ Penerimaan\ PAD} \times 100\%$$

6. Analisis Varians Belanja Daerah

$$\text{Analisis Varians} = \frac{Realisasi\ Belanja\ Tahun\ t}{Anggaran\ Belanja\ Tahun\ t} \times 100\%$$

7. Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah

$$\text{Pertumbuhan Tahun t} = \frac{R.Belanja\ Thn_t - R.Belanja\ Thn_{t-1}}{R.Belanja\ Thn_{t-1}}\ x\ 100\%$$

8. Analisis Keserasian Belanja Daerah

   a. Analisis Belanja Operasi Terhadap Total Belanja

   $$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{Realisasi\ Belanja\ Operasi}{Total\ Belanja\ Daerah}$$

   b. Analisis Belanja Modal Terhadap Total Belanja

   $$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{Realisasi\ Belanja\ Modal}{Total\ Belanja\ Daerah}$$

9. Analisis Efisiensi Belanja Daerah

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{Realisasi\ Belanja\ Daerah}{Anggaran\ Belanja\ Daerah} \times 100\%$$

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil BPK RI Perwakilan Provinsi DIY

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi DIY merupakan lembaga negara yang memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah, khususnya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi wilayah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Bantul, dan Kota Yogyakarta.

Pelaksanaan kegiatan magang berlokasi di:

Nama Tempat Magang	:	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat	:	Jl. HOS Cokroaminoto No 52, Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55244
Nomor Telepon	:	(0274) 563635
Visi	:	Menjadi lembaga pemeriksaan keuangan Negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai dasar untuk berperan aktif dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan.

Misi :

1. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara secara bebas dan mandiri;
2. Memberikan pendapat untuk meningkatkan mutu pengelolaan data tanggung jawab keuangan Negara;
3. Berperan aktif dalam menemukan dan mencegah segala bentuk penyalahgunaan dan penyelewenangan keuangan Negara;
4. Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional.

Struktur Organisasi :

4.2 Aktivitas Magang

Pelaksanaan magang dimulai pada tanggal 5 September 2022 s.d. tanggal 5 Desember 2022. Sebelum penulis melaksanakan aktivitas magang, penulis melakukan beberapa persiapan seperti mempelajari profil Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi DIY terkait fungsi dan tugas BPK sebagai instansi pemerintahan yang memiliki tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi DIY, Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi DIY, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan lembaga terkait di lingkungan entitas.

Sebelum melaksanakan magang dengan durasi tiga bulan, penulis diberikan pembekalan oleh Ibu Ester Arie Noerachmawati selaku Kepala Sub Bagian Humas dan TU. Pembekalan yang diberikan berkaitan dengan jam operasional kantor dan tata busana selama aktivitas magang dilakukan. Magang dilakukan selama lima hari kerja, yaitu dari hari Senin s.d. Jum'at dengan total sembilan jam kerja, dimulai dari pukul 08.00 WIB s.d. 17.00 WIB. Pada pembekalan diawal telah dijelaskan bahwa penulis selama magang akan ditempatkan di bidang Subauditorat.

Awal bulan September merupakan minggu pertama pelaksanaan magang, penulis diberi kesempatan untuk mengenali lingkungan sekitar kantor serta memperkenalkan diri kepada bidang terkait. Pada bagian Subauditorat, penulis didampingi oleh mentor yaitu Ibu Farida Sofia Irawati S.E., Ak., M.Acc. yang membantu dan membimbing selama penulis melaksanakan magang. Selama magang tiga bulan di BPK, setiap hari

Selasa penulis di minta untuk mengikuti kajian rutin dan membuat resume dari hasil kajian tersebut.

Pada minggu pertama magang, penulis diberikan penugasan oleh mentor yaitu mempelajari, melakukan resume, dan memahami SPKN 2017 yang merupakan standar pemeriksaan keuangan negara yang dijadikan pedoman BPK dalam melaksanakan pemeriksaan. Setelah memahami SPKN, penulis diberikan tugas lanjutan untuk melakukan diskusi terkait SPKN dengan teman sesama magang. Hasil diskusi tersebut, kemudian di jadikan pertanyaan dan di upload di quiziz. Setelah itu kami melakukan review dengan menjawab pertanyaan tersebut dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana kami telah memahami SPKN.

Minggu kedua, penulis ditugaskan untuk melakukan pemaparan atau presentasi terkait SPKN kepada mentor dengan dilanjutkan sesi tanya jawab. Pada minggu ini juga penulis diberikan tugas baru untuk melakukan analisis terkait SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik) dan mencari serta melakukan studi kasus yang berkaitan dengan retribusi, pajak dan pendapatan daerah. Selain itu, penulis juga diberikan tugas tambahan untuk membantu melakukan pencocokan DEP (Data Entitas Pemeriksaan).

Pada minggu ketiga, penulis diberi penugasan untuk membuat resume mengenai SPAP, melakukan analisis perbandingan perbedaan antara SPAP dengan SPKN, melakukan rekap data banparpol untuk Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo, mencocokan data dan memeriksa data nama dan jabatan pimpinan DPRD serta jajarannya,

membuat desain cover buku DEP untuk tahun 2022, membuat desain buku IHPD (Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah) Tahun 2023 serta membantu bagian IT untuk melakukan uji coba aplikasi BPK terbaru, yaitu SAPA BPK. Pada minggu terakhir dibulan September, penulis masih melanjutkan pekerjaaan untuk mendesain buku IHPD, melakukan koreksi dokumen DEP, membuat resume SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) terkait PSAP 01-Penyajian Laporan Keuangan dan PSAP 02-Laporan Realisasi Anggaran.

Di minggu pertama dan kedua bulan Oktober, penulis masih melanjutkan pekerjaan sebelumnya, yaitu membuat desain buku IHPD, membuat resume dan PPT PSAP 03-Laporan Arus Kas, PSAP 04-Catatan Atas Laporan Keuangan, PSAP 05-Akuntansi Persediaan, PSAP 06-Akuntansi Investasi, dan PSAP 07-Akuntansi Aset Tetap. Pada minggu ketiga dan keempat bulan Oktober, penulis dirolling sementara ke bagian Humas dan mendapat pekerjaan untuk melakukan *stock opname* dalam rangka peningkatan akreditasi Perpustakaan BPK RI Perwakilan Provinsi DIY. *Stock opname* merupakan kegiatan perhitungan jumlah stok persediaan barang secara fisik dan menyesuaikannya dengan catatan akuntansi. Kegiatan *stock opname* di Perpustakaan BPK RI Perwakilan Provinsi DIY cukup menyita waktu, karena penulis harus menginput data buku yang merupakan BMN (Barang Milik Negara). Total buku yang di *stock opname* adalah 4776 buku. Selain melakukan kegiatan *stock opname*, pada minggu tersebut penulis juga membantu menginput sepuluh data buku

baru dengan membantu memberi nomor induk dan menempel label sesuai dengan no induknya.

Pada minggu pertama bulan November diisi dengan kegiatan pengklasifikasian buku sesuai komponennya dan membantu pencocokan data Komponen 5 milik pusat dengan data milik Perpustakaan BPK RI Perwakilan Provinsi DIY. Pada minggu kedua diberi penugasan untuk membuat 30 soal pilihan ganda terkait dengan SPAP 01 dan SPAP 02 serta diberi tambahan untuk membuat 13 soal Buletin Teknis 17 yang berkaitan dengan Aset Tak Berwujud. Pada minggu ketiga di bulan November diberi penugasan untuk melengkapi komponen klasifikasi perpustakaan, serta membuat laporan akhir magang yang dibuat dengan tujuan untuk diserahkan ke tempat magang sebagai hasil kegiatan yang dilakukan selama tiga bulan magang. Pada minggu keempat sampai dengan minggu terakhir magang, diberi penugasan untuk melakukan perbandingan data BMN pusat dengan cek fisik buku yang ada di perpustakaan. Selain itu, juga melanjutkan dan menyelesaikan tugas P2 Program Perencanaan Pendahuluan Kinerja BUMD.

4.3 Ketercapaian Pelaksanaan Magang

Minggu Ke-	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Tujuan	Output
1	5-9 September 2022	• Penerimaan peserta magang serta pemaparan yang dilakukan oleh Kasubag Humas yaitu ibu Ester Arie Noerachmawati, S.E., M.M • Penyusunan jadwal magang • Mempelajari, melakukan resume, memahami, berdiskusi dan membuat pertanyaan di Quiziz terkait SPKN (Standar Pemeriksaan Keuangan Negara)	• Pembekalan dilakukan untuk memberitahukan terkait jam operasional kantor dan tata busana selama aktivitas magang dilakukan • Pembuatan jadwal untuk mempermudah pelaksanaan program magang • Tujuan mempelajari SPKN untuk menambah pengetahuan penulis tentang standar pemeriksaan yang dijadikan pedoman oleh BPK RI	• Jadwal magang • Resume dan PPT SPKN • 10 Pertanyaan SPKN di Quiziz
2	12-16 September 2022	• Melakukan pemaparan atau presentasi terkait SPKN kepada mentor dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab • Menganalisis SPAP (Standar Pemeriksaan Akuntansi Publik) • Mencari serta melakukan studi kasus tentang retribusi, pajak, dan pendapatan daerah • Membantu menyusun, mereview, dan mencocokan DEP	• Tujuan pemaparan dan sesi tanya jawab untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dan pemahaman penulis terkait dengan SPKN • Analisis SPAP bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap penulis terkait dengan standar yang digunakan dalam pemeriksaan akuntansi publik	• Notulensi hasil presentasi • Analisis SPAP • 5 Studi kasus terkait retribusi, pajak, dan pendapatan daerah • Hasil resume Kajian Rutin Selasa

		(Data Entitas Pemeriksaan) • Mengikuti serta membuat resume Kajian Rutin Selasa dengan judul "Waktu-Waktu Yang Tidak Direkomendasikan Untuk Melakukan Sholat dan Keutamaan Sholat Berjamaah"		
3	19-23 September 2022	• Membuat resume SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik) • Melakukan analisis perbandingan perbedaan antara SPAP dengan SPKN • Melakukan rekap data banparpol untuk Kabupaten Gunung Kidul dan Kulon Progo • Membantu mencocokan data dan memeriksa data nama dan jabatan pimpinan DPRD serta jajarannya • Membantu membuat desain cover buku DEP (Data Entitas Pemeriksaan) untuk tahun 2022 dan IHPD 2023 (Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah) • Mengikuti serta membuat resume	• Membuat resume SPAP sebagai output dari pemahaman penulis terkait SPAP • Tujuan analisis perbandingan SPAP dan SPKN adalah untuk melihat perbedaan antara standar yang digunakan untuk pemerintah publik dan standar yang digunakan untuk pemeriksaan keuangan negara • Tujuan uji coba IT terkait aplikasi SAPA BPK adalah untuk mengetahui sejauh mana aplikasi yang dikembangkan dapat digunakan dan diterapkan	• Resume SPAP • Hasil analisis perbandingan SPAP dengan SPKN • Desain cover DEP 2022 dan IHPD 2023 • Hasil resume Kajian Rutin Selasa

		Kajian Rutin Selasa dengan judul "Syarat Menjadi Imam Berjamaah, Adab Berjamaah, dan 7 Syarat Menjadi Makmum Apabila Jaraknya Jauh dari Imam" • Membantu bagian IT untuk melakukan uji coba aplikasi BPK terbaru, yaitu SAPA BPK		
4	26-30 September 2022	• Melanjutkan desain buku IHPD • Mengoreksi dokumen DEP • Mengikuti serta membuat resume Kajian Rutin Selasa dengan judul "Tabaruj dalam Pandangan Islam" • Membuat resume SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) terkait PSAP 01-Penyajian Laporan Keuangan dan PSAP 02-Laporan Realisasi Anggaran • Tanggal 1 Oktober mengikuti Upacara Hari Kesaktian Pancasila	• Tujuan mengoreksi dokumen DEP yaitu untuk mengecek data keuangan tahun tersebut • Membuat resume SAP bertujuan untuk lebih memahami standar akuntansi pemerintah	• Desain buku IHPD • Hasil resume Kajian Rutin Selasa • Resume SAP, PSAP 01-Penyajian Laporan Keuangan dan PSAP 02-Laporan Realisasi Anggaran
5 & 6	3-14 Oktober 2022	• Melanjutkan desain buku IHPD • Membuat resume dan PPT PSAP 03-	• Membuat resume PSAP bertujuan untuk lebih memahami PSAP per bagian yang	• Resume dan PPT PSAP 03-Laporan Arus Kas, PSAP 04-

		Laporan Arus Kas, PSAP 04-Catatan Atas Laporan Keuangan, PSAP 05-Akuntansi Persediaan, PSAP 06-Akuntansi Investasi, dan PSAP 07-Akuntansi Aset Tetap • Mengikuti serta membuat resume Kajian Rutin Selasa	mencakup LAK, CALK, Akuntansi Persediaan, Akuntansi Investasi dan Akuntansi Aset Tetap	Catatan Atas Laporan Keuangan, PSAP 05-Akuntansi Persediaan, PSAP 06-Akuntansi Investasi, dan PSAP 07-Akuntansi Aset Tetap • Hasil resume Kajian Rutin Selasa
7 & 8	17-31 Oktober 2022	• Membantu Sub Bagian Humas melakukan kegiatan stock opname • Membantu menginput 10 data buku baru dengan membantu memberi nomor induk dan menempel label sesuai dengan no induknya • Mengikuti Upacara Hari Sumpah Pemuda	• Tujuannya untuk menghitung barang secara fisik dan menyesuaikannya dengan catatan akuntansi	• Data Stock Opname Oktober 2022 Perpustakaan BPK RI Perwakilan DIY
9	1-4 November 2022	• Membantu pengklasifikasian buku sesuai komponennya • Membantu pencocokan data Komponen 5 milik pusat dengan milik Perpustakaan BPK RI Perwakilan DIY • Mengikuti serta membuat resume Kajian Rutin	• Tujuan pengklasifikasian buku sesuai dengan komponennya adalah untuk memisahkan buku referensi dengan buku lainnya • Tujuan pencocokan data tersebut adalah untuk mengecek apa saja komponen-komponen yang ada	• Data Komponen 5 • Hasil resume Kajian Rutin Selasa

		Selasa dengan judul “Tata Cara Pengurusan Jenazah”	di pusat yang belum ditambahkan	
10	7-11 November 2022	• Membuat 30 soal pilihan ganda terkait SPAP 01 dan SPAP 02 • Mengikuti serta membuat resume Kajian Rutin Selasa dengan judul “Zakat” • Membuat 13 soal Buletin Teknis 17 terkait Aset Tak Berwujud	• Tujuan membuat soal-soal tersebut adalah untuk membantu menguji diri seberapa jauh pemahaman penulis terhadap SPAP dan Buletin Teknis	• 30 soal pilihan ganda SPAP 01 dan SPAP 02 • Hasil resume Kajian Rutin Selasa • 13 soal Buletin Teknis 17
11	14-18 November 2022	• Melengkapi komponen klasifikasi perpus • Membuat laporan akhir magang	• Tujuan membuat komponen pengklasifikasian untuk akreditasi perpustakaan • Tujuan membuat laporan magang sebagai sarana untuk mengkomunikasikan kegiatan yang dilakukan selama magang	• Data komponen klasifikasi • Laporan akhir magang
12	21 November-5 Desember 2022	• Membandingkan data BMN pusat dengan cek fisik • Melanjutkan dan menyelesaikan tugas P2 (program perencanaan) atas BUMD • Mengikuti serta membuat resume Kajian Rutin Selasa dengan judul “Puasa”	• Untuk mengecek apakah data fisik sudah sesuai dengan data di BMN pusat • Tujuan membuat P2 adalah sebagai sarana pembelajaran untuk memahami bagaimana cara merancang program pemeriksaan sebelum kita melakukan pemeriksaan tersebut	• Data yang BMN dan fisik yang sudah dicek • P2 (Program Perencanaan) Pendahuluan Kinerja BUMD • Hasil resume Kajian Rutin Selasa

4.4 Data dan Output yang Didapatkan

Berikut ini merupakan data dan output yang diperoleh penulis selama kegiatan magang berlangsung di Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta :

1. Pemahaman mengenai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)
2. Pemahaman mengenai Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)
3. Pemahaman mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
4. Pemahaman mengenai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP)
5. Pemahaman mengenai analisis studi kasus retribusi, pajak, dan pendapatan daerah
6. Desain buku IHPD 2023 (Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah)
7. Desain cover DEP (Data Entitas Pemeriksaan)
8. Hasil Pemeriksaan LPJ Banparpol (Bantuan Partai Politik)
9. Data *Stock Opname* Oktober 2022 Perpustakaan BPK RI Perwakilan Provinsi DIY
10. LHP LKPD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 s.d. 2021

4.5 Gambaran Umum Daerah

4.5.1 Kondisi Geografis

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan daerah otonom setingkat provinsi yang terletak di bagian selatan Pulau Jawa bagian tengah, dengan ibukota Yogyakarta. Secara astronomis, Provinsi DIY terletak antara 70 33' LS - 8 12' LS dan 110 00' BT - 110 50' BT berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Samudera Hindia, dengan luas wilayah 3.185,80 km^2 atau kurang lebih 0,15% luas daratan Indonesia.

Wilayah ini terdiri atas satu kota dan empat kabupaten, yang meliputi Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Kulon Progo. Setiap kabupaten/kota mempunyai kondisi fisik yang berbeda sehingga potensi alam yang tersedia juga tidak sama. Perbedaan kondisi fisik ini ikut menentukan dalam rencana pengembangan daerah.

4.5.2 Data Khusus

Tabel 4.1
Realisasi Anggaran Pendapatan, Belanja, Pembiayaan Bersih, SILPA Pemprov DIY

Tahun Anggaran	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)	Pembiayaan Bersih (Rp)	SILPA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2017	5.085.241.219.288,27	4.920.626.776.618,68	179.451.993.468,59	344.066.436.138,18
2018	5.443.179.144.512,93	5.296.403.530.714,17	325.018.633.070,18	471.794.246.868,94
2019	5.699.357.232.440,50	5.544.650.430.330,02	265.861.156.884,94	420.567.958.995,42
2020	5.611.510.924.299,71	5.433.180.699.355,67	306.122.988.195,42	484.453.213.139,46
2021	5.703.100.309.342,23	5.530.173.461.667,19	381.560.546.739,46	554.487.394.414,50

Sumber: BPK, LHP LKPD Tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

4.5.3 Pembahasan

Analisis kinerja keuangan pada Pemprov DIY tahun anggaran 2017 s.d. 2021 akan dilakukan dengan membaginya menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Analisis Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah

1) Analisis Varians Pendapatan Daerah

Analisis varians pendapatan daerah merupakan informasi yang berisi selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan. Analisis varians dilakukan dengan tujuan untuk mengukur dan menilai sejauh mana kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya. Menurut Mahmudi (2019), kinerja pemerintah daerah dapat dikatakan baik jika dapat memperoleh pendapatan melebihi jumlah target yang telah dianggarkan.

Tabel 4.2
Varians Pendapatan Pemprov DIY

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Varians/Selisih (Rp)	%	Kinerja
2017	5.080.252.165.566,33	5.085.241.219.288,27	4.989.053.721,94	100,10	Baik
2018	5.393.544.092.997,71	5.443.179.144.512,93	49.635.051.515,22	100,92	Baik
2019	5.713.924.265.502,71	5.699.357.232.440,50	(14.567.033.062,21)	99,75	Kurang Baik
2020	5.558.125.044.792,93	5.611.510.924.299,71	53.385.879.506,78	100,96	Baik
2021	5.674.896.535.689,00	5.703.100.309.342,23	28.203.773.653,23	100,50	Baik
Rata-Rata				100,45	Baik

Sumber: LHP LK Pemprov DIY *Audited* BPK, yang diolah

Tabel di atas merupakan hasil perhitungan dari analisis varians pendapatan daerah pada Laporan Keuangan Pemprov DIY Tahun Anggaran 2017 s.d. 2021. Perhitungan varians pendapatan daerah dilakukan dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Analisis Varians} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Tahun}_t}{\text{Anggaran Pendapatan Tahun}_t} \times 100\%$$

Perhitungan varians pendapatan menunjukkan kinerja pemerintah daerah dalam memperoleh pendapatan yang telah ditargetkan dari tahun anggaran 2017 s.d. 2021.

Berdasarkan hasil analisis varians pendapatan pada tahun 2017 s.d. 2018, realisasi pendapatan yang dicapai oleh Pemprov DIY dinilai baik karena realisasi anggaran pendapatan yang dicapai dapat melebihi anggaran atau target yang telah ditetapkan *(favourable)*. Akan tetapi pada tahun 2019, kinerja Pemprov DIY dinilai kurang baik karena pada tahun tersebut pemerintah tidak mampu mencapai target anggaran atau target pendapatan yang telah ditetapkan sehingga varians bernilai negatif *(unfavourable)*.

Pada tahun 2020 s.d. 2021, kinerja pendapatan Pemprov DIY dinilai baik. Hal ini dikarenakan, pada tahun tersebut pemerintah mampu kembali mencapai target anggaran yang ditetapkan *(favourable)*. Sehingga jika dilihat secara keseluruhan, berdasarkan rata-rata persentase pencapaian realisasi pendapatan daerah dari tahun 2017 s.d. 2021, Pemprov DIY dapat mencapai 100,45% pendapatan dari anggaran yang ditetapkan.

Grafik 4.1 Varians Pendapatan Pemprov DIY

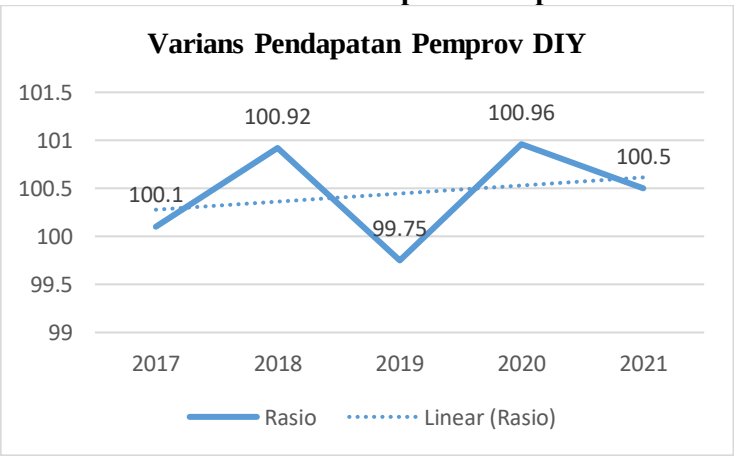

Grafik di atas menunjukkan perkembangan dari varians pendapatan Pemprov DIY dari tahun 2017 s.d. 2021. Jika dilihat *trendline* grafiknya, selama lima tahun anggaran varians pendapatan mengalami fluktuasi.

Varians dengan pendapatan tertinggi terjadi pada tahun 2020, yaitu sebesar 100,96%, sedangkan varians pendapatan terendah terjadi pada tahun 2019, yaitu sebesar 99,75%. Rendahnya tingkat varians pendapatan tersebut terjadi karena pemerintah tidak mampu mencapai target anggaran pendapatan.

2) Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Analisis pertumbuhan pendapataan daerah dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah kinerja keuangan APBD pemerintah daerah pada tahun anggaran tertentu mengalami pertumbuhan positif atau negatif. Tentunya diharapkan pertumbuhan pendapatan tersebut positif dan kecenderungannya (*trend*) meningkat. Sebaliknya, jika terjadi pertumbuhan yang negatif maka hal itu menunjukkan terjadi penurunan kinerja pendapatan dan harus dicari penyebabnya, apakah karena faktor ekonomi makro yang di luar kendali pemerintah daerah atau karena manajemen keuangan daerah yang kurang baik. Hal ini dilakukan sebagai bahan evaluasi pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan mereka. Pertumbuhan pendapatan pemerintah daerah diharapkan dapat mengimbangi laju inflasi.

Tabel 4.3
Analisis Pertumbuhan Pendapatan Pemprov DIY

Tahun	Pendapatan per Tahun (Rp)	Tahun Pertumbuhan	Pertumbuhan (%)
2017	5.080.252.165.566,33		
2018	5.393.544.092.997,71	2017-2018	6,17
2019	5.713.924.265.502,71	2018-2019	5,94
2020	5.558.125.044.792,93	2019-2020	(2,73)
2021	5.674.896.535.689,00	2020-2021	2,10
Rata-Rata			2,87

Sumber: LHP LK Pemprov DIY *Audited* BPK, yang diolah

Tabel di atas merupakan hasil perhitungan dari analisis pertumbuhan pendapatan Pemprov DIY dari tahun 2017 s.d. 2021. Perhitungan tersebut dilakukan dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Analisis Pertumbuhan} = \frac{Pend.Thn_t - Pend.Thn_{t-1}}{Pend.Thn_{t-1}} \times 100\%$$

Tabel 4.4
Tingkat Inflasi Pemprov DIY

Tahun	Inflasi Nasional (%)	Inflasi Pemerintah DIY (%)	Tingkat Pertumbuhan (%)
2017	3,61	4,20	
2018	3,13	2,66	-1,54
2019	2,72	2,77	0,11
2020	1,68	1,40	-1,37
2021	1,87	2,29	0,89
Rata-Rata	2,60	2,66	-0,48

Sumber: BPS Yogyakarta

Berdasarkan hasil perhitungan tabel di atas, terdapat pertumbuhan pendapatan yang bervariatif setiap tahunnya yang jika dirata-rata untuk jangka waktu lima tahun terakhir yaitu 2,87%. Hal ini berarti Pemprov DIY cukup baik, karena pertumbuhan tersebut lebih tinggi dari perbandingan dengan tingkat pertumbuhan inflasi Pemprov DIY yang memiliki rata-rata -0,48%.

Grafik 4.2
Pertumbuhan Pendapatan Pemprov DIY

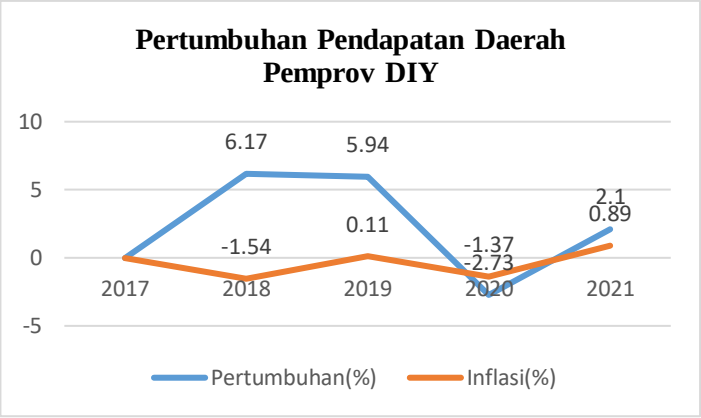

Grafik di atas menunjukkan perbandingan antara pertumbuhan pendapatan Pemprov DIY dengan tingkat pertumbuhan inflasinya. Berdasarkan grafik tersebut, kita dapat melihat bahwa rata-rata pertumbuhan pendapatan Pemprov DIY lebih tinggi dan lebih baik jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan inflasinya. Jika diuraikan sebagai berikut:

a. Tingkat pertumbuhan pendapatan Provinsi DIY pada tahun 2017-2018 sebesar 6,17%, sehingga lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat inflasinya yang pada saat itu bernilai negatif sebesar -1,54%. Di tahun ini, tingkat pertumbuhan pendapatan Provinsi DIY lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun selanjutnya.

b. Tingkat pertumbuhan pendapatan Provinsi DIY pada tahun 2018-2019 sebesar 5,94%, sehingga lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat inflasinya yang pada saat itu sebesar 0,11%.

c. Tingkat pertumbuhan pendapatan Provinsi DIY pada tahun 2019-2020 sebesar -2,73%, sehingga lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat

inflasinya yang pada saat itu sebesar -1,37%. Tahun ini menjadi tingkat pertumbuhan pendapatan terendah bagi Provinsi DIY. Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat pertumbuhan di tahun tersebut yaitu adanya pandemi COVID-19.

d. Tingkat pertumbuhan pendapatan Provinsi DIY pada tahun 2020-2021 sebesar 2,10%, sehingga lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat inflasinya yang pada saat itu sebesar 0,89%.

3) Analisis Rasio Keuangan Pendapatan Daerah

a. Rasio Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi dihitung dengan melakukan perbandingan antara jumlah PAD dengan total penerimaan daerah. Pemerintah daerah dianggap memiliki kemampuan yang baik dalam penyelenggaraan desentralisasi jika nilai PAD nya semakin tinggi. Berikut merupakan tabel perhitungan Derajat Desentralisasi untuk Pemprov DIY.

Tabel 4.5
Rasio Derajat Desentralisasi Pemprov DIY

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp)	Total Pendapatan Daerah (TPD) (Rp)	Hasil Rasio (%)
2017	1.780.967.277.884,33	5.080.252.165.566,33	35,06
2018	1.925.549.027.558,71	5.393.544.092.997,71	35,70
2019	2.015.621.583.744,71	5.713.924.265.502,71	35,27
2020	1.799.932.971.064,54	5.558.125.044.792,93	32,38
2021	1.861.579.698.446,00	5.674.896.535.689,00	32,80
Rata-Rata			34,24

Sumber: LHP LK Pemprov DIY *Audited* BPK, yang diolah

Grafik 4.3
Derajat Desentralisasi Pemprov DIY

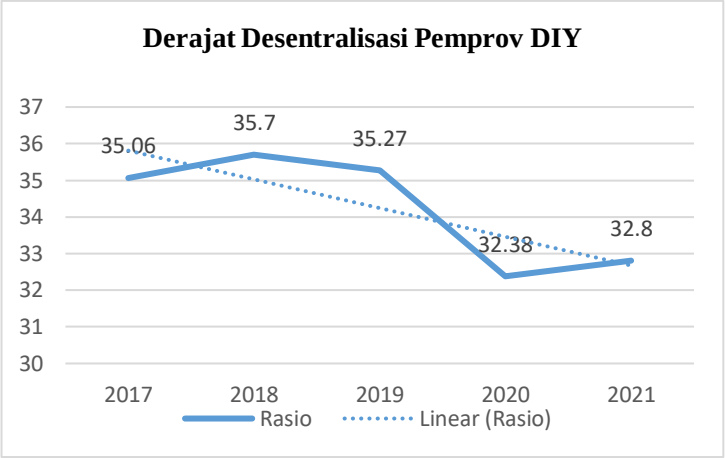

Selama lima tahun anggaran, *trendline* rasio derajat desentralisasi Pemprov DIY mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2017 ke tahun 2021.

Berdasarkan hasil perhitungan tabel dan grafik di atas, rasio derajat desentralisasi Pemprov DIY memiliki hasil yang bervariatif. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya kenaikan dan penurunan pada rasio tersebut. Berikut uraian penjelasannya:

a. Pada tahun 2017, rasio derajat desentralisasi Pemprov DIY berada pada persentase 35,06%;
b. Pada tahun 2018, rasio derajat desentralisasi Pemprov DIY berada pada persentase 35,70%, sehingga mengalami kenaikan sebesar 0,64% dari tahun 2017. Pada tahun ini, rasio derajat desentralisasi Provinsi DIY lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun lainnya;

c. Pada tahun 2019, rasio derajat desentralisasi Pemprov DIY berada pada persentase 35,27%, sehingga mengalami penurunan sebesar 0,43% dari tahun 2018;
d. Pada tahun 2020, rasio derajat desentralisasi Pemprov DIY berada pada persentase 32,38%, sehingga kembali mengalami penurunan sebesar 2,89% dari tahun 2019. Tahun ini menjadi tingkat rasio derajat desentralisasi terendah bagi Pemprov DIY; dan
e. Pada tahun 2021, rasio derajat desentralisasi Pemprov DIY berada pada persentase 32,80%, sehingga kembali mengalami kenaikan sebesar 0,42% dari tahun 2020.

Jika dirata-rata selama lima tahun anggaran (2017 s.d. 2021), hasil rasio derajat desentralisasi Pemprov DIY masih berada di bawah 50%, yaitu sebesar 34,24%. Berdasarkan tabel 2.1 yang bersumber dari Tim Litbang Depdagri, dengan persentase rasio derajat desentralisasi 34,24% maka tingkat penilaian desentralisasi fiskal untuk Pemprov DIY dikategorikan cukup. Sehingga, Pemprov DIY dinilai masih belum sepenuhnya dapat mandiri dalam mencukupi kebutuhan anggaran setiap tahunnya. Hal ini menyebabkan Pemprov DIY masih memerlukan bantuan dari pemerintah pusat berupa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

b. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Jika dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{R. Ketg. Keu. Daerah} = \frac{Pendapatan\ Transfer}{Total\ Pendapatan\ Daerah} \times 100\%$$

Berikut merupakan tabel perhitungan rasio ketergantungan keuangan daerah:

Tabel 4.6
Rasio Ketergantungan Keuangan Pemprov DIY

Tahun	Pendapatan Transfer (Rp)	Total Pendapatan Daerah (TPD) (Rp)	Hasil Rasio (%)
2017	3.284.457.694.835,00	5.080.252.165.566,33	64,65
2018	3.388.039.565.092,00	5.393.544.092.997,71	62,82
2019	3.689.782.581.758,00	5.713.924.265.502,71	64,57
2020	3.750.658.573.728,39	5.558.125.044.792,93	67,48
2021	3.805.740.337.243,00	5.674.896.535.689,00	67,02
Rata-Rata			65,31

Sumber: LHP LK Pemprov DIY *Audited* BPK, yang diolah

Berdasarkan tabel 2.2 yang bersumber dari Tim Litbang Depdagri, rasio ketergantungan keuangan daerah dinilai rendah apabila berada di bawah persentase 20%. Sebaliknya, dikatakan tinggi jika melampaui persentase 50%.

Berdasarkan tabel perhitungan di atas, kita dapat melihat serta membandingkan bahwa dari tahun 2017 s.d. 2021, rasio ketergantungan keuangan daerah untuk Pemprov DIY masih relatif tinggi, yaitu dengan rata-rata rasio berada pada persentase 65,31%. Hal ini dapat diartikan bahwa Pemprov DIY tingkat ketergantungan keuangan daerahnya masih

tinggi. Sehingga, masih memerlukan adanya transfer dana dari pemerintah pusat berupa DAU dan DAK.

Grafik 4.4
Rasio Ketergantungan Keuangan Pemprov DIY

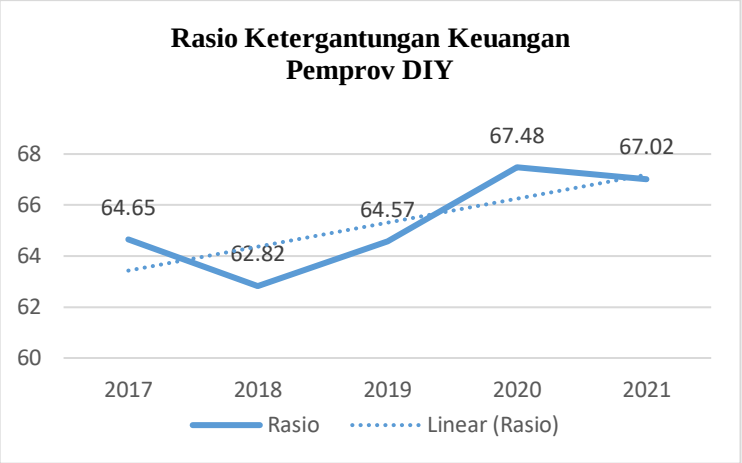

Grafik di atas menunjukkan perkembangan rasio ketergantungan keuangan Pemprov DIY dari tahun 2017 s.d. 2021. Jika dilihat *trendline* grafiknya dari tahun 2017 ke tahun 2021, rasio ketergantungan keuangan daerah Pemprov DIY mengalami kenaikan yang relatif tinggi.

Berdasarkan grafik tersebut, kita dapat melihat bahwa rasio ketergantungan keuangan tertinggi Pemprov DIY terjadi pada tahun 2020. Sedangkan untuk rasio ketergantungan keuangan terendahnya terjadi pada tahun 2018.

c. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Mahmudi (2019), rasio efektivitas PAD merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam

memobilisasi PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Jika dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{R. Efektivitas PAD} = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ PAD}{Target\ Penerimaan\ PAD} \times 100\%$$

Tabel 4.7
Rasio Efektivitas PAD Pemprov DIY

Tahun	Realisasi Penerimaan PAD (Rp)	Target Penerimaan PAD (Rp)	Hasil Rasio (%)	Kinerja
2017	1.851.973.396.065,27	1.780.967.277.884,33	103,99	Sangat Efektif
2018	2.040.723.348.530,93	1.925.549.027.558,71	105,98	Sangat Efektif
2019	2.082.795.334.434,50	2.015.621.583.744,71	103,33	Sangat Efektif
2020	1.876.706.829.354,71	1.799.932.971.064,54	104,27	Sangat Efektif
2021	1.900.923.074.881,46	1.861.579.698.446,00	102,11	Sangat Efektif
Rata-Rata			103,94	Sangat Efektif

Sumber: LHP LK Pemprov DIY *Audited* BPK, yang diolah

Berdasarkan tabel 2.3 yang bersumber dari Mahmudi 2019, rasio efektivitas PAD dinilai tidak efektif jika berada pada persentase kurang dari 75%, dan dikatakan sangat efektif jika dapat melampaui 100%.

Tabel perhitungan rasio PAD di atas menunjukkan bahwa selama lima tahun anggaran, yaitu dari tahun 2017 s.d. 2021, rata-rata rasio efektivitas PAD Pemprov DIY dapat dikategorikan sangat efektif karena berada pada persentase di atas 100%, yaitu sebesar 103,94%.

Grafik 4.5 Rasio Efektivitas PAD Pemprov DIY

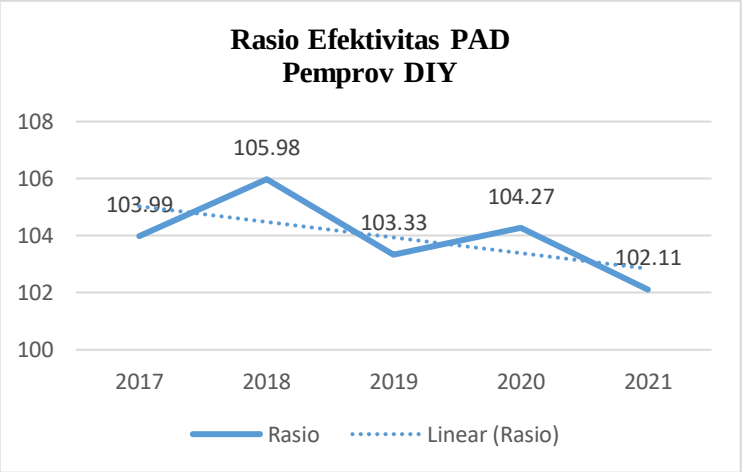

Grafik di atas menunjukkan perkembangan rasio efektivitas PAD Pemprov DIY dari tahun 2017 s.d. 2021. Jika dilihat *trendline* grafiknya dari tahun 2017 s.d. 2021, rasio efektivitas PAD Pemprov DIY mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami penurunan. Namun penurunan tersebut tidak terlalu signifikan karena masih berada pada persentase >100%, sehingga kinerja keuangan masih dalam kategori sangat efektif.

Berdasarkan grafik tersebut, kita dapat melihat bahwa rasio efektivitas PAD tertinggi Pemprov DIY terjadi pada tahun 2018, sedangkan rasio terendah terjadi pada tahun 2021.

2. Analisis Kinerja Keuangan Belanja Daerah

1) Analisis Varians Belanja Daerah

Analisis varians belanja merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dan anggaran. Kinerja keuangan pemerintah daerah dikatakan baik dan efisien jika terdapat selisih kurang (realisasi belanja kurang dari jumlah yang dianggarkan), sedangkan dikatakan tidak baik jika terdapat selisih lebih (realisasi belanja lebih dari jumlah yang dianggarkan. Analisis varians belanja daerah dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Analisis Varians} = \frac{Realisasi\ Belanja\ Tahun\ t}{Anggaran\ Belanja\ Tahun\ t} \times 100\%$$

Tabel 4.8
Analisis Varians Belanja Daerah Pemprov DIY

Tahun	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Varians/Selisih (Rp)	(%)	Kinerja
2017	4.531.366.652.282,22	4.195.049.264.563,98	(336.317.387.718,24)	92,58	Baik
2018	4.939.087.891.778,51	4.524.021.293.356,79	(415.066.598.421,72)	91,60	Baik
2019	4.945.650.384.323,45	4.523.871.348.582,31	(421.779.035.741,14)	91,40	Baik
2020	4.767.282.153.598,35	4.347.344.000.359,04	(419.938.153.239,31)	91,19	Baik
2021	6.046.849.748.828,00	5.530.173.461.667,19	(516.676.287.160,81)	91,46	Baik
Rata-Rata				91,65	Baik

Sumber: LHP LK Pemprov DIY *Audited* BPK, yang diolah

Berdasarkan tabel analisis varians belanja daerah di atas, selama tahun 2017 s.d. 2021 menunjukkan selisih anggaran dengan realisasi yang bernilai negatif, yaitu untuk tahun 2017 sebesar Rp 336.317.387.718,24 atau 92,58%, tahun 2018 sebesar Rp 415.066.598.421,72 atau 91,60%, tahun 2019 sebesar Rp 421.779.035.741,14 atau 91,40%, tahun 2020 sebesar Rp 419.938.153.239,31 atau 91,19%, dan untuk tahun 2021 sebesar Rp 516.676.287.160,81 atau 91,46%.

Nilai varians negatif mengindikasikan bahwa kinerja keuangan Pemprov DIY baik. Hal tersebut dikarenakan terdapat selisih kurang, yaitu realisasi belanja kurang dari jumlah yang telah dianggarkan. Hal ini terjadi dikarenakan Pemprov DIY mampu melakukan efisiensi belanja.

Grafik 4.6
Varians Belanja Daerah Pemprov DIY

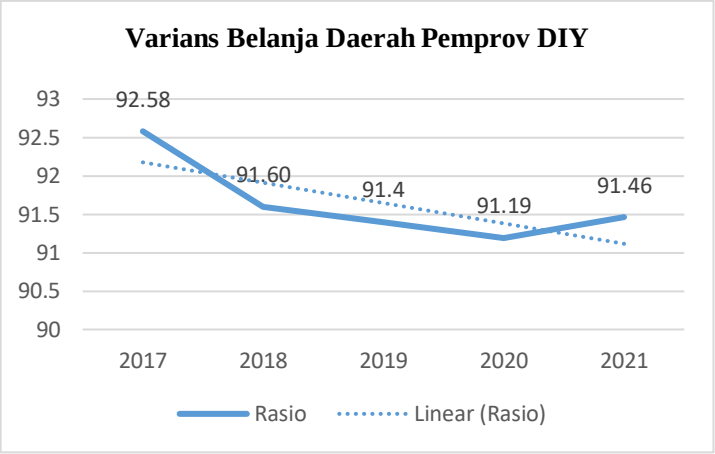

Grafik di atas menunjukkan perkembangan rasio dari varians belanja daerah Pemprov DIY dari tahun 2017 s.d. 2021. Jika dilihat *trendline* grafiknya, selama lima tahun anggaran varians belanja daerah Pemprov DIY mengalami penurunan dari tahun 2017 ke tahun 2021. Namun penurunan tersebut tidak terlalu signifikan karena rata-rata kinerja keuangan masih masuk dalam kategori baik dan efisien.

Berdasarkan grafik tersebut, kita dapat melihat bahwa pada tahun 2017, varians belanja daerah Pemprov DIY lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lainnya. Sedangkan varians belanja daerah terendahnya terjadi pada tahun 2020.

2) Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah

Analisis pertumbuhan belanja daerah dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pertumbuhan belanja dari tahun ke tahun. Belanja daerah biasanya memiliki kecenderungan *(trendline)* untuk naik. Hal ini

dikarenakan adanya penyesuaian dengan inflasi, perubahan nilai tukar rupiah, perubahan cakupan pelayanan, dan penyesuaian faktor makro ekonomi.

Analisis pertumbuhan belanja daerah dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan Thn t} = \frac{R.Belanja\ Thn_t - R.Belanja\ Thn_{t-1}}{R.Belanja\ Thn_{t-1}}\ x\ 100\%$$

Tabel 4.9
Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah Pemprov DIY

Tahun Anggaran	Realisasi Belanja Thn t-1 (Rp)	Realisasi Belanja Thn t (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%	Kinerja
2016 - 2017	3.149.386.300.988,05	4.195.049.264.563,98	1.045.662.963.575,93	33,202	Baik
2017 - 2018	4.195.049.264.563,98	4.524.021.293.356,79	328.972.028.792,81	7,842	Baik
2018 - 2019	4.524.021.293.356,79	4.523.871.348.582,31	-149.944.774,48	-0,003	Kurang Baik
2019 - 2020	4.523.871.348.582,31	4.347.344.000.359,04	-176.527.348.223,27	-3,902	Kurang Baik
2020 - 2021	4.347.344.000.359,04	5.530.173.461.667,19	1.182.829.461.308,15	27,208	Baik

Sumber: LHP LK Pemprov DIY *Audited* BPK, yang diolah

Grafik 4.7
Pertumbuhan Belanja Daerah Pemprov DIY

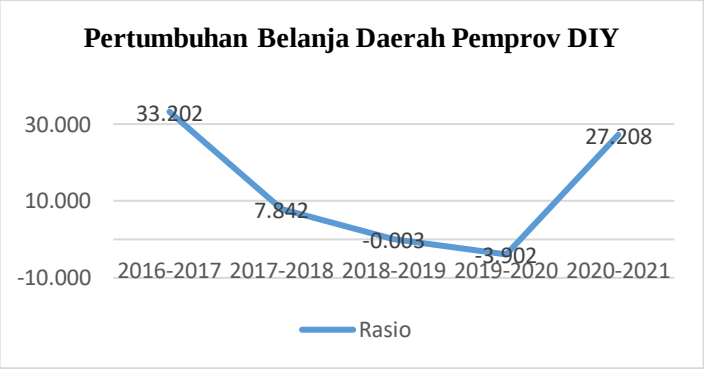

Berdasarkan tabel perhitungan dan grafik di atas, analisis pertumbuhan yang dilakukan menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan belanja positif meskipun pada tahun anggaran 2018-2019 dan 2019-2020 terjadi penurunan sebesar -0,003% dan -3,902%. Hal tersebut dapat

dikarenakan adanya rasionalisasi belanja daerah berdasarkan evaluasi Gubernur untuk APBD di tahun tersebut dan berlaku bagi semua sektor belanja daerah.

Pertumbuhan belanja Pemprov DIY yang terjadi selama periode tahun anggaran 2017 s.d. 2021 secara berurutan yaitu sebesar 33,202%, 7,842%, -0,003%, -3,902%, dan 27,208% dengan rata-rata selama lima tahun anggaran yaitu 12,869%.

Pertumbuhan belanja tertinggi terjadi pada tahun anggaran 2016-2017, yaitu sebesar 33,202% dan pertumbuhan belanja terendah terjadi pada tahun anggaran 2019-2020, yaitu sebesar -3,902%.

3) Analisis Keserasian Belanja Daerah

Analisis keserasian belanja daerah dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui keseimbangan antarbelanja. Hal ini berkaitan dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilisasi. Berdasarkan Kebijakan Akuntansi Nomor 17 mengenai Akuntansi Belanja, belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberikan manfaat jangka pendek, biasanya manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran. Belanja operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

Rasio ini berguna untuk memberikan informasi kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi.

Analisis keserasian belanja daerah untuk belanja operasi dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{Realisasi\ Belanja\ Operasi}{Total\ Belanja\ Daerah}$$

Tabel 4.10
Analisis Rasio Belanja Operasi Pemprov DIY

Tahun	Realisasi Belanja Operasi (Rp)	Total Belanja Daerah (Rp)	Hasil Analisis (%)
2017	3.140.664.073.385,38	4.195.049.264.563,98	0,75
2018	3.391.193.567.029,05	4.524.021.293.356,79	0,75
2019	3.488.668.163.097,46	4.523.871.348.582,31	0,77
2020	3.101.070.722.657,40	4.347.344.000.359,04	0,71
2021	3.575.258.030.927,29	5.530.173.461.667,19	0,65
Rata-Rata			0,73

Sumber: LHP LK Pemprov DIY *Audited* BPK, yang diolah

Analisis keserasian belanja daerah untuk belanja modal dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{Realisasi\ Belanja\ Modal}{Total\ Belanja\ Daerah}$$

Tabel 4.11
Analisis Rasio Belanja Modal Pemprov DIY

Tahun	Realisasi Belanja Modal (Rp)	Total Belanja Daerah (Rp)	Hasil Analisis (%)
2017	1.046.730.141.538,60	4.195.049.264.563,98	0,25
2018	1.132.827.726.327,74	4.524.021.293.356,79	0,25
2019	1.035.203.185.484,85	4.523.871.348.582,31	0,23
2020	940.633.924.931,64	4.347.344.000.359,04	0,22
2021	654.839.728.747,39	5.530.173.461.667,19	0,12
Rata-Rata			0,21

Sumber: LHP LK Pemprov DIY *Audited* BPK, yang diolah

Grafik 4.8 Keserasian Belanja Daerah Pemprov DIY

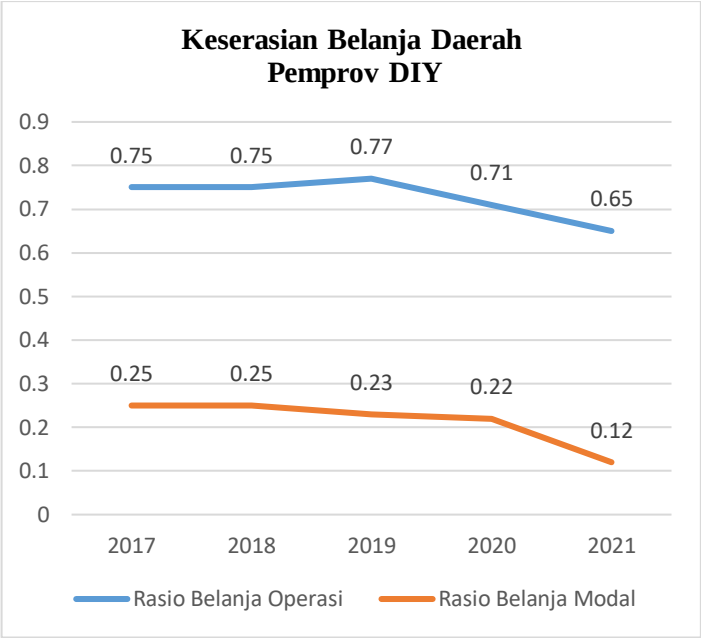

Berdasarkan tabel perhitungan dan grafik di atas, analisis keserasian belanja daerah secara umum dapat terlihat dengan sebagian besar dana yang dialokasikan dari total belanja daerah lebih besar digunakan untuk belanja operasional dibandingkan belanja modal, sehingga rasio untuk belanja operasional relatif lebih tinggi daripada belanja modal. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata belanja operasional selama lima tahun yaitu sebesar 0,73% sedangkan rata-rata belanja modal hanya sebesar 0,21%. Berdasarkan tabel 2.4 mengenai kriteria rasio keserasian belanja daerah menurut Mahmudi (2019), proporsi untuk belanja operasi adalah 60%-90% dan untuk belanja modal adalah 5%-20%. Rasio belanja operasi Pemprov DIY secara umum sesuai dengan tabel 2.4, sedangkan untuk rasio belanja modal kurang sesuai karena 1% melebihi kategori proporsi yang disajikan secara umumnya.

Tingginya rasio belanja operasi dibandingkan dengan rasio belanja modal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar dana yang dimiliki oleh Pemprov DIY diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasional yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran.

Besarnya belanja operasional dikarenakan aset yang dimiliki Pemprov DIY cukup banyak dan memerlukan dana untuk pemeliharaannya. Dampak dari besarnya belanja operasional yaitu adanya kendala revitalisasi aset daerah untuk tahun-tahun berikutnya. Sehingga pemerintah daerah harus menyusun kajian dan analisis mendalam terhadap aset tersebut berdasarkan perbandingan asas manfaat dan biaya yang dikeluarkan.

Menurut Mahmudi (2010), pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan tinggi cenderung memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintah daerah yang tingkat pendapatannya rendah. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemprov DIY merupakan salah satu pemerintah daerah yang memiliki pendapatan yang relatif tinggi.

4) Analisis Efisiensi Belanja Daerah

Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio ini dilakukan dengan tujuan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah daerah. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika

rasio efisiensinya kurang dari 100%. Sebaliknya jika lebih dari 100% berarti mengindikasikan terjadinya pemborosan anggaran.

Menurut Sharon (2019) dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996. Kriteria tingkat efisiensi anggaran belanja sebagai berikut:

a. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efisien.
b. Jika hasil pencapaian antara 90%-100%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efisien.
c. Jika hasil pencapaian antara 80%-90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efisien.
d. Jika hasil pencapaian antara 60%-80%, maka anggaran belanja dikatakan efisien.
e. Jika hasil pencapaian di bawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efisien.

Analisis efisiensi belanja daerah dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{Realisasi\ Belanja\ Daerah}{Anggaran\ Belanja\ Daerah} \times 100\%$$

Tabel 4.12
Analisis Efisiensi Belanja Daerah Pemprov DIY

Tahun	Anggaran Belanja Daerah (Rp)	Realisasi Belanja Daerah (Rp)	Efisiensi (%)	Kriteria
2017	4.531.366.652.282,22	4.195.049.264.563,98	92,58	Kurang Efisien
2018	4.939.087.891.778,51	4.524.021.293.356,79	91,60	Kurang Efisien
2019	4.945.650.384.323,45	4.523.871.348.582,31	91,47	Kurang Efisien
2020	4.767.282.153.598,35	4.347.344.000.359,04	91,19	Kurang Efisien
2021	6.046.849.748.828,00	5.530.173.461.667,19	91,46	Kurang Efisien
Rata-Rata			91,66	Kurang Efisien

Sumber: LHP LK Pemprov DIY *Audited* BPK, yang diolah

Berdasarkan tabel analisis efisiensi belanja daerah, kita dapat melihat bahwa realisasi anggaran belanja Pemprov DIY tidak terdapat angka yang melebihi anggaran belanja.

Hasil perhitungan rasio efisiensi belanja daerah Pemprov DIY secara berurutan dari tahun 2017 s.d. 2021 yaitu sebesar 92,58%, 91,60%, 91,47%, 91,19%, dan 91,46%. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa Pemprov DIY belum mampu melakukan penghematan secara maksimal, karena rata-rata efisiensi belanja daerah berada pada persentase 91,66%. Jika hasil pencapaian antara 90%-100%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efisien.

Grafik 4.9

Efisiensi Belanja Daerah Pemprov DIY

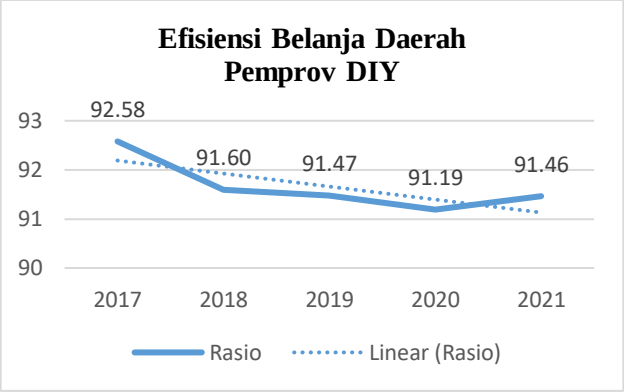

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan perkembangan rasio dari efisiensi belanja daerah Pemprov DIY dari tahun 2017 s.d. 2021. Jika dilihat *trendline* grafiknya, selama lima tahun anggaran Pemprov DIY mengalami penurunan dari tahun 2017 ke tahun 2021.

Rasio efisiensi belanja daerah tertinggi terjadi pada tahun 2017, yaitu 92,58% dan rasio efisiensi belanja daerah terendah terjadi pada tahun 2020,

yaitu 91,19%. Bila di rata – rata dalam lima tahun menunjukkan bahwa Pemprov DIY kurang efisien dalam melakukan belanja daerah untuk tahun 2017-2021. Menurut Mahmudi (2010), angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi ini tidak bersifat absolut, tetapi relatif artinya tidak ada standar baku yang dianggap baik untuk rasio ini.

3. Analisis Kinerja Keuangan Pembiayaan Daerah

Analisis Kinerja Keuangan Pembiayaan Daerah dilakukan untuk pola anggaran pemerintah daerah. Selain itu juga dapat digunakan untuk membaca kebijakan anggaran pemerintah daerah. Salah satu pos yang paling penting dalam pembiayaan ini adalah SILPA. Struktur APBD yang berbasis kinerja memungkinkan terdapat SILPA pada akhir tahun anggaran. Keberadaan SILPA memberikan sinyal adanya Kinerja Keuangan APBD yang baik pada tahun anggaran bersangkutan. Perhitungan SILPA dapat digunakan untuk menilai Kinerja Keuangan anggaran. SILPA yang bersaldo positif memberikan indikasi adanya kesehatan fiskal dan kesinambungan fiskal daerah yang baik. Sebaliknya jika terjadi SIKPA (Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran), hal ini mengindikasikan adanya masalah dalam manajemen keuangan daerah dan mengganggu kesinambungan fiskal daerah. Analisis SILPA dimaksudkan untuk mengevaluasi tentang penyebab terjadinya SILPA, apakah karena keberhasilan dalam melakukan efisiensi anggaran, atau karena efisiensi dan efektivitas pendapatan daerah, atau justru karena lemahnya pelaksanaan anggaran sehingga banyak program dan kegiatan tidak terlaksana dengan optimal.

Tabel 4.13
SILPA Pemerintah Provinsi DIY

Tahun	SILPA
2017	344.066.436.138,18
2018	471.794.248.868,94
2019	420.567.958.995,42
2020	484.453.213.139,46
2021	554.487.394.414,50
Rata-Rata	455.073.850.311,30

Sumber: LHP LK Pemprov DIY *Audited* BPK, yang diolah

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa analisis kinerja keuangan pembiayaan daerah khususnya pertumbuhan SILPA Pemprov DIY bersaldo positif. Pertumbuhan SILPA tahun 2017 s.d. 2021 secara berurutan yaitu Rp 344.066.436.138,18; Rp 471.794.248.868,94; Rp 420.567.958.995,42; Rp 484.453.213.139,46; serta Rp 554.487.394.414,50 dengan pertumbuhan SILPA tertinggi terjadi pada tahun 2021, dan pertumbuhan SILPA terendah terjadi pada tahun 2017.

Hasil penelitian ini didukung oleh pendapat yang dikemukakan oleh Mahmudi (2010) bahwa struktur APBD yang berbasis kinerja memungkinkan terdapat SILPA pada akhir tahun anggaran.

4.5.4 Ringkasan Hasil Penelitian

Ringkasan hasil penelitian berupa Kinerja Keuangan APBD Pemprov DIY selama tahun 2017 s.d. 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.14
Ringkasan Analisis Kinerja Keuangan Pemprov DIY

No	Analisis Kinerja Keuangan	Hasil Penelitian (Rata-Rata)	Kategori
1	**Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah**		
	1) Analisis Varians Pendapatan Daerah	100,45%	Baik
	2) Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah	2,87%	Cukup Baik
	3) Analisis Rasio Keuangan Pendapatan Daerah		
	a) Rasio Derajat Desentralisasi	34,24%	Cukup
	b) Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah	65,31%	Tinggi
	c) Rasio Efektivitas PAD	103,94%	Sangat Efektif
2	**Kinerja Keuangan Belanja Daerah**		
	1) Analisis Varians Belanja Daerah	91,65%	Baik
	2) Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah	12,869%	Positif
	3) Analisis Keserasian Belanja Daerah		
	a) Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja	0,73%	Sesuai Proporsi Secara Umum
	b) Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja	0,21%	Kurang Sesuai Proporsi Secara Umum
	c) Analisis Efisiensi Belanja Daerah	91,66%	Kurang Efisien
3	**Analisis Kinerja Keuangan Pembiayaan Daerah**		
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	455.073.850.311,30	Positif

Sumber: Data diolah (2017-2021)

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka sesuai dengan tujuan penelitian dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

5.1.1 Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah

1) Kinerja keuangan pendapatan daerah Pemprov DIY jika dilihat melalui analisis varians pendapatan daerah secara umum dapat dikatakan baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan target anggaran pendapatan dari tahun 2017-2021 yang memiliki angka rata-rata 100,45%.
2) Kinerja keuangan pendapatan daerah Pemprov DIY jika dilihat melalui analisis pertumbuhan pendapatan daerah selama tahun anggaran 2017-2021 cukup baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan yang positif, yaitu 2,87%. Kecenderungan *(trend)* pertumbuhan pendapatan daerah fluktuatif dari tahun ke tahun.
3) Kinerja keuangan pendapatan daerah Pemprov DIY jika dilihat melalui analisis rasio keuangan pendapatan daerah menunjukkan bahwa derajat desentralisasi Pemprov DIY tahun 2017-2021 dikategorikan cukup dengan rata-rata di bawah 50%, yaitu 34,24%. Ketergantungan keuangan Pemprov DIY selama tahun 2017-2021 masih tinggi, hal ini menunjukkan bahwa Pemprov DIY masih bergantung terhadap Pemerintah Pusat yang ditunjukkan dari rasio ketergantungan daerah yang melebihi angka 50%,

yaitu 65,31%. Rasio efektivitas PAD Pemprov DIY selama tahun 2017-2021 dapat dikategorikan sangat efektif. Hal tersebut ditunjukkan dengan rata-rata rasionya yang berada pada persentase di atas 100%, yaitu sebesar 103,94%.

5.1.2 Kinerja Keuangan Belanja Daerah

1) Kinerja keuangan belanja daerah Pemprov DIY dilihat dari analisis varians belanja daerah secara umum dapat dikatakan baik karena dari tahun 2017-2021 tidak ada yang melebihi dari anggaran belanja, sehingga mengindikasikan adanya efisiensi atau penghematan anggaran.
2) Kinerja keuangan belanja daerah dilihat dari analisis pertumbuhan belanja daerah, Pemprov DIY menunjukkan pertumbuhan yang positif. Kecenderungan *(trendline)* pertumbuhan belanja Pemprov DIY selama tahun 2017-2021 adalah fluktuatif.
3) Kinerja keuangan belanja daerah dilihat dari analisis keserasian belanja daerah Pemprov DIY selama tahun 2017-2021, secara umum terlihat bahwa sebagian besar dana yang dialokasikan dari total belanja daerah lebih besar digunakan untuk belanja operasional dibandingkan belanja modal, sehingga rasio belanja operasional relatif lebih tinggi daripada belanja modal. Hal tersebut ditunjukkan dengan rata-rata belanja operasional selama lima tahun yaitu 0,73% lebih tinggi dibandingkan rata-rata belanja modalnya, yaitu 0,21%.

4) Kinerja keuangan belanja daerah dilihat dari analisis efisiensi belanja daerah, terlihat bahwa realisasi anggaran belanja Pemprov tidak terdapat angka yang melebihi anggaran belanja. Meskipun begitu Pemprov DIY masih dikategorikan belum mampu melakukan penghematan secara maksimal. Hal tersebut dikarenakan rata-rata efisiensi belanja daerah tahun 2017-2021 berada pada persentase 91,66%. Jika hasil pencapaian antara 90%-100%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efisien (Sharon, 2019).

5.1.3 Kinerja Keuangan Pembiayaan Daerah

Berdasarkan analisis di atas, kinerja keuangan pembiayaan daerah Pemprov DIY secara umum sudah baik. Hal tersebut dapat terlihat dari SILPA yang memiliki saldo positif, sehingga mengindikasikan adanya kesehatan fiskal dan kesinambungan fiskal daerah yang baik. Pemprov DIY sudah tepat dalam menyajikan suatu rencana anggaran.

5.2 Saran

Berdasarkan permasalahan yang ada dan dengan memperhatikan hasil dari analisis serta kesimpulan di atas, maka saran yang mungkin berguna bagi Pemerintah Provinsi DIY, yaitu sebagai berikut:

1) Pemerintah Provinsi DIY sebaiknya melakukan peningkatan PAD dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai

dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. Beberapa hal yang dapat dilakukan yaitu:

a. Meningkatkan pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki ekonomi tinggi, dengan sasaran meningkatnya jumlah aset daerah yang dapat dikelola secara optimal sehingga dapat mendorong peningkatan PAD;
b. Peningkatan kualitas pelayanan perpajakan dengan sasaran meningkatnya pelayanan dan retribusi daerah dengan membangun sistem dan prosedur administrasi yang cepat dan mudah, seperti bus samsat keliling, dan sistem online kesamsatan yang telah dioperasikan saat ini (E-Posti).
c. Peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur terkait perpajakan, dengan sasaran meningkatnya pemahaman masyarakat dan aparatur terkait perpajakan sehingga animo masyarakat untuk membayar pajak semakin tinggi, dan aparatur dapat lebih optimal dalam melakukan pemungutan pajak;
d. Peningkatan pengawasan pengelolaan PAD, dengan sasaran meningkatnya pengawasan pengelolaan PAD di DIY sehingga dapat diketahui permasalahan sejak dini, dan melaksanakan reward dan punishment;
e. Penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diimbangi dengan peningkatan fasilitas kepada masyarakat; dan

f. Peningkatan dan perluasan fasilitas sarana dan prasarana pendukung layanan pembayaran pajak dan retribusi daerah.

2) Pemerintah Provinsi DIY diharapkan lebih meningkatkan belanja modalnya untuk investasi dan menambah aset daerah untuk keperluan jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul, H. (2014). *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat.

Atmaja, & Istiqomah. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2014–2018. *Molecules*, *2*(1), 1–12.

Badan Pemeriksa Keuangan. (2017). Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017.

Badan Pemeriksa Keuangan. (2018). Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2018.

Badan Pemeriksa Keuangan. (2019). Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2019.

Badan Pemeriksa Keuangan. (2020). Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2020.

Badan Pemeriksa Keuangan. (2021). Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2021.

Bisma, & Susanto. (2010). Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003 – 2007. *Ganec Swara*, *4*(3), 75–86.

Budiarso, N., Tinangon, J., & Rondonuwu, R. (2015). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, *3*(4), 23–32.

Feldasintya Wardani. (2020). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Diy) Tahun 2013-2017. *Jurnal Teknologi Informasi*, *4*(2). https://doi.org/10.36294/jurti.v4i2.1845

Halim. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah, Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat.

Hatmoko, A. W. (2021). Model Konseptual Analisis Kinerja Keuangan Pemprov DIY Sebelum dan Sesudah Menerima Danais. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, *3*, 13–30. https://doi.org/10.20885/ncaf.vol3.art2

https://yogyakarta.bps.go.id/site/resultTab

Kansil. (2008). *Kitab Undang-Undang Otonomi Daerah (1999-2001)*. PT Pradnya Paramita.

Kebijakan Akuntansi Nomor 17 mengenai Akuntansi Belanja.

Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. STIE YKPN.

Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. STIM YPKN.

Mangkunegara. (2002). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan* (4th ed.). Remaja Rosdakarya.

Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.

Pengelolaan Keuangan Negara. (2004). *Undang–Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.*

Peraturan Pemerintah. (2001). *Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah*

Putri, A. A. (2018). *Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)(Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta)*

Rakadewa. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Suparyanto Dan Rosad (2015*, *5*(3), 248–253.

Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.*

Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.*

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.*

Sawir. (2005). *Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan*. PT Gramedia Pustaka Utama.

Sharon. (2019). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh Tengah. *Jurnal Akuntansi Muhammadiyah*, *9*(1), 74–81. https://doi.org/10.37598/jam.v9i1.647

Sucipto. (2013). Penilaian Kinerja Keuangan. *Jurnal Ekonomi & Bisnis, FE Universitas Sumatera Utara, Medan*.

Sugiyarso. (2005). *Manajemen Keuangan Perusahaan Laporan Keuangan Pengelolaan Aset, Kewajiban dan Modal, serta Pengukuran Kinerja Perusahaan*. Media Pressindo.

Tim Litbang. (1991). *Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Tingkat II Dalam Rangka Otonomi Daerah Yang Nyata Dan Bertangung Jawab*.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Diterima Magang

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 52 Yogyakarta 55244 Telepon (0274) 563635

Nomor : 146/S/XVIII.YOG/08/2022 Yogyakarta, 22 Agustus 2022
Perihal : Ralat Jawaban Izin Magang

Kepada
Yth. Kepala Program Studi Akuntansi
Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Di Tempat

Sehubungan surat Saudara nomor 040/Prodi.Akt/Magang-Mandiri/VI/2022 tanggal 11 Agustus 2022, perihal Permohonan Magang Mahasiswa pada BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, atas nama :

No	Nama	No. Mahasiswa	Prodi
1.	Adira Nisrina Setyaningsih	19312212	Akuntansi
2.	Yumna Rizqi Ramadhan	19312198	Akuntansi
3.	Rizqi Akbar Romadhoni	19312020	Akuntansi
4.	Rahmat Gangsar Rizky	19312200	Akuntansi

kami memberikan ijin untuk melakukan kegiatan magang kurang lebih selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 5 September 2022 s.d. 5 Desember 2022, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati ketentuan/tata tertib yang berlaku di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Wajib menyerahkan laporan magang kepada kami.
3. Dalam melaksanakan kegiatan magang tidak dipungut biaya.
4. Selama kegiatan magang mahasiswa diwajibkan melaksanakan protokol kesehatan dan magang dilaksanakan secara *hybrid.*
5. Wajib menyampaikan bukti swab antigen yang masih berlaku sebelum melaksanakan kegiatan magang.
6. Pada saat awal dan akhir magang agar dapat didampingi oleh Dosen Pembimbing Magang atau pihak kampus yang terkait dengan pemagangan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI KEPALA PERWAKILAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA

Widhi Widayat
NIP 196908041997031005

Lampiran 2 Surat Keterangan Selesai Magang

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 52 Yogyakarta 55244 Telepon (0274) 563635

SURAT KETERANGAN
Nomor: 49 /KET/XVIII.YOG/12/2022

Kami yang bertandatangan dibawah ini,

Nama	:	Widhi Widayat
NIP	:	196908041997031005
Jabatan	:	Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi D.I.Yogyakarta

Menerangkan bahwa mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini;

No	Nama Mahasiswa	NIM	Prodi	Universitas
1	Adira Nisrina Setyaningsih	19312212	Akuntansi	Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Telah melaksanakan praktek kerja lapangan/PKL Magang dengan **BAIK** terhitung mulai 5 September 2022 sampai dengan 5 Desember 2022 pada kantor BPK Perwakilan Provinsi D.I.Yogyakarta.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 29 Desember 2022
Kepala Perwakilan,

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI
KEPALA PERWAKILAN
PROVINSI D.I. YOGYAKARTA

Widhi Widayat
NIP 196908041997031005

Lampiran 3 Website E-PPID BPK DIY

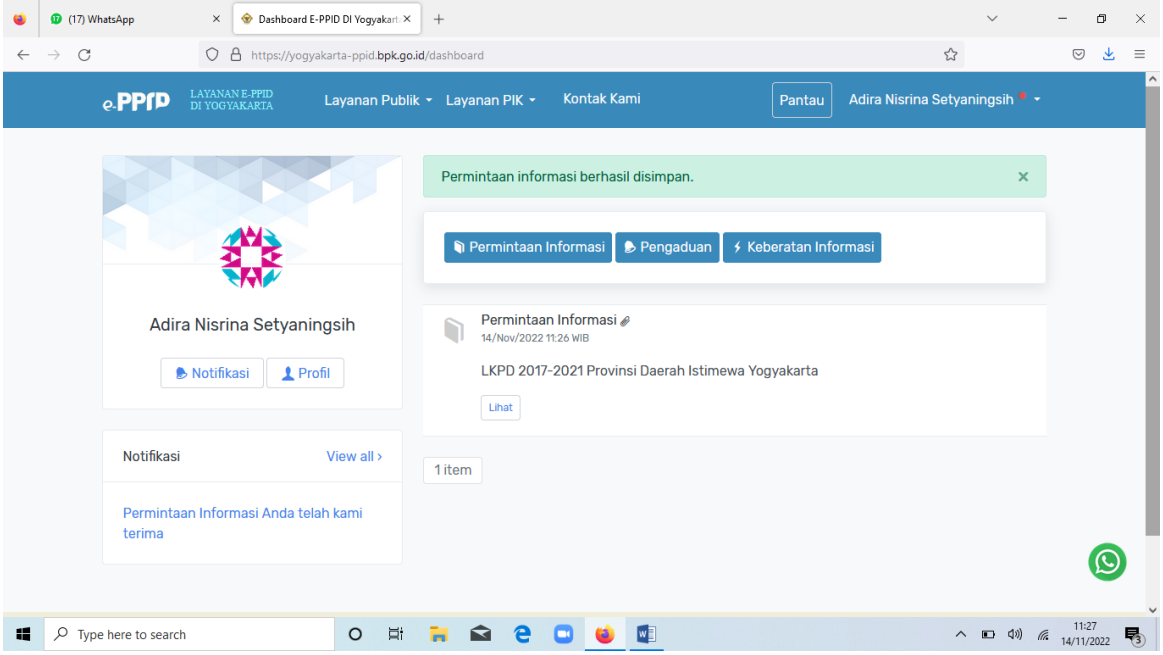

DOKUMENTASI GAMBAR

Gambar 1.
Presentasi SPKN (Standar Pemeriksaan Keuangan Negara)

Gambar 2.
Presentasi SPAP (Standar Pemeriksaan Akuntansi Publik)

Gambar 3.
Diskusi dan Tanya Jawab

Gambar 4.
Mereview Pemahaman SPKN dengan Mengerjakan Quiziz

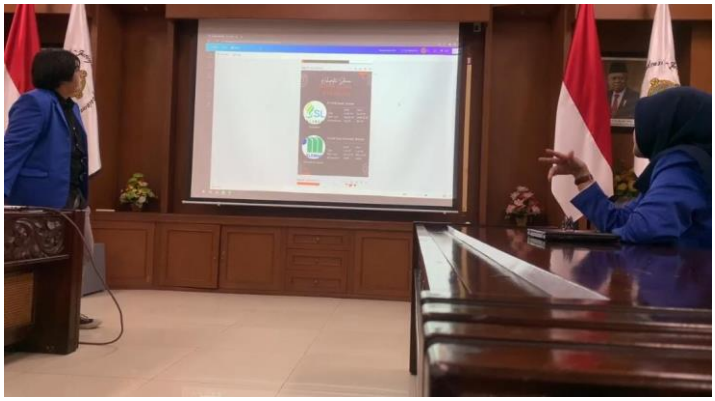

Gambar 5.
Merancang dan Mendesain Buku IHPD 2023

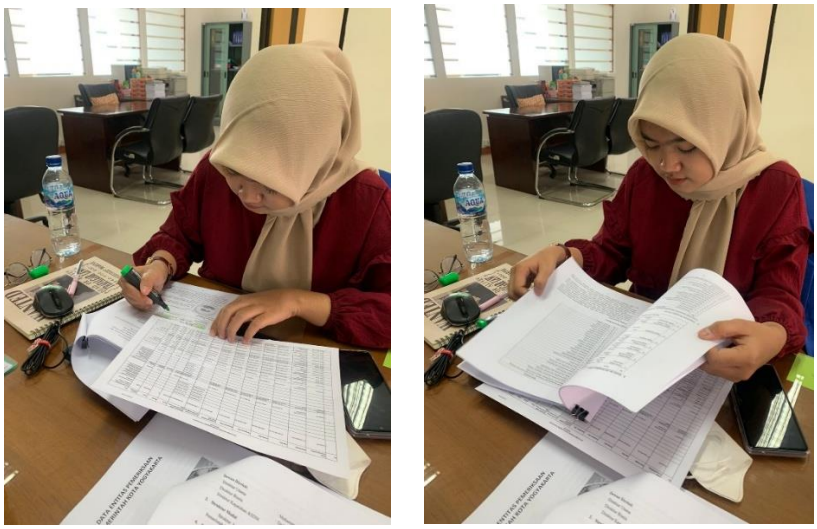

Gambar 6.
Mereview dan Mencocokan DEP (Data Entitas Pemeriksaan)

Gambar 7.
Melakukan Koreksi DEP (Data Entitas Pemeriksaan)

Gambar 8.
Membantu Membuat Desain Cover DEP (Data Entitas Pemeriksaan)

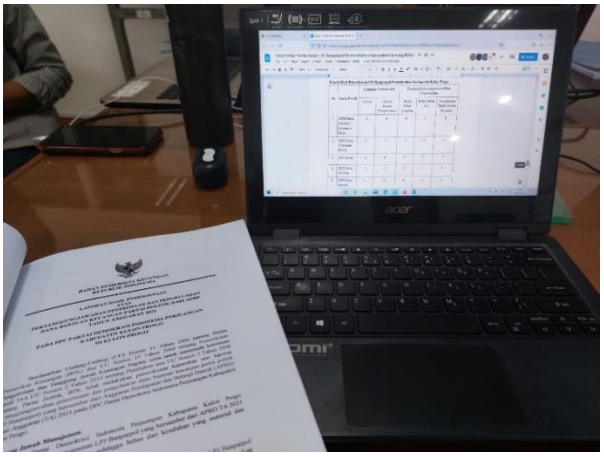

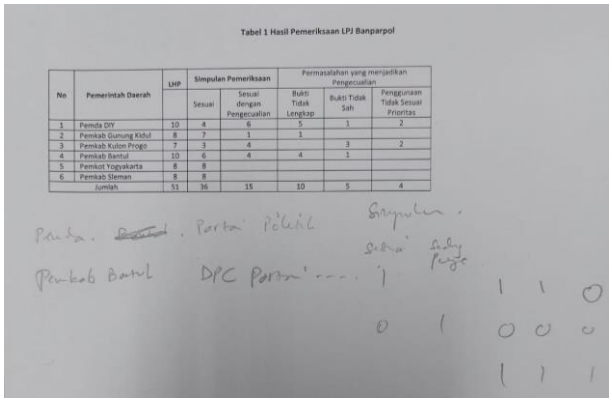

Tabel 1 Hasil Pemeriksaan LPJ Banparpol

No	Pemerintah Daerah	LHP	Simpulan Pemeriksaan		Permasalahan yang menjadikan Pengecualian		
			Sesuai	Sesuai dengan Pengecualian	Bukti Tidak Lengkap	Bukti Tidak Sah	Penggunaan Tidak Sesuai Prioritas
1	Pemda DIY	10	4	6	5	1	2
2	Pemkab Gunung Kidul	8	7	1	1		
3	Pemkab Kulon Progo	7	3	4		3	2
4	Pemkab Bantul	10	6	4	4	1	
5	Pemkot Yogyakarta	8	8				
6	Pemkab Sleman	8	8				
Jumlah		51	36	15	10	5	4

Gambar 9.
Membantu Rekap Data Banparpol untuk Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo

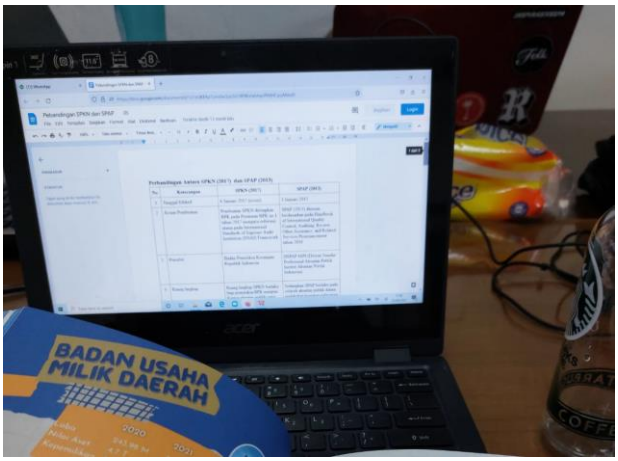

Gambar 10.
Membuat Perbandingan antara SPKN dan SPAP

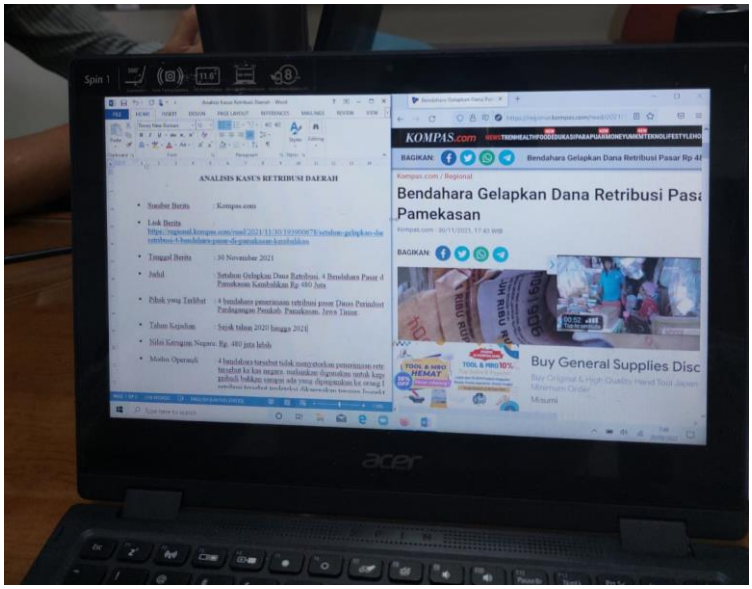

Gambar 11.
Menganalisis dan Melakukan Studi Kasus Mengenai Retribusi, Pajak, dan Pendapatan Daerah

Gambar 12.
Melakukan Kegiatan *Stock Opname*

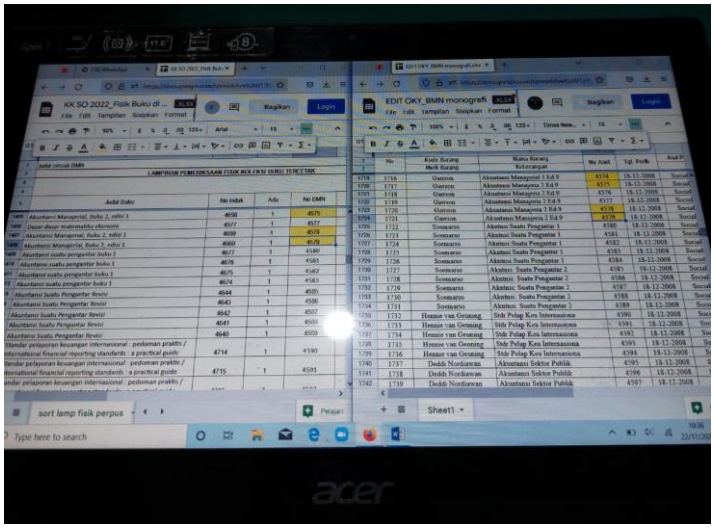

Gambar 13.
Mencocokkan Data BMN Pusat dan Cek Fisik

Gambar 14.
Mengadakan Pertemuan antara Dosen Pembimbing dan Mentor Magang

Gambar 15.
Foto Bersama Dosen Pembimbing dan Mentor Magang

Gambar 16.
Mengikuti Kegiatan Upacara Hari Kesaktian Pancasila

JADWAL KEGIATAN MAGANG

Hari	Tanggal	Nama	Absen Pagi	Absen Sore	Keterangan	Kegiatan
Senin	05/09/2022	Adira Nisrina Setyaningsih	07:30	17:00	WFO	
Selasa	06/09/2022	Adira Nisrina Setyaningsih	07:30	17:00	WFO	Membaca dan memahami SPKN 2017
Rabu	07/09/2022	Adira Nisrina Setyaningsih	07:30	17:00	WFO	Diskusi dan review SPKN 2017
Kamis	08/09/2022	Adira Nisrina Setyaningsih			WFH	Melanjutkan resume SPKN + buat PPT
Jumat	09/09/2022	Adira Nisrina Setyaningsih	07:00	16:30	WFO	Membuat pertanyaan di Quizz mengenai SPKN.
Sabtu	10/09/2022	Adira Nisrina Setyaningsih				
Minggu	11/09/2022	Adira Nisrina Setyaningsih				
Senin	12/09/2022	Adira Nisrina Setyaningsih	07:30	16:30	WFO	Rangkuman SPKN + resume + analisis SPKN. Mencari teori tentang reviu desain
Selasa	13/09/2022	Adira Nisrina Setyaningsih	07:15	16:00	WFO	- Reviu dan mencocokan DEP (data basis pemerintah) - Resume Bagian
Rabu	14/09/2022	Adira Nisrina Setyaningsih	07:20	16:30	WFO	- Analisis teori [illegible] dan desain
Kamis	15/09/2022	Adira Nisrina Setyaningsih	07:35	17:00	WFO	Melanjutkan analisis teori
Jumat	16/09/2022	Adira Nisrina Setyaningsih			WFH	Melanjutkan resume SPAP
Sabtu	17/09/2022	Adira Nisrina Setyaningsih				
Minggu	18/09/2022	Adira Nisrina Setyaningsih				
Senin	19/09/2022	Adira Nisrina Setyaningsih			WFH	Melanjutkan resume SPAP + buat PPT
Selasa	20/09/2022	Adira Nisrina Setyaningsih	07:30	15:35	WFO	- Rekap cover DEP, dll - Rekap dan tempel EE & KP
Rabu	21/09/2022	Adira Nisrina Setyaningsih	07:30	16:30	WFO	Membuat cover DEP BPK
Kamis	22/09/2022	Adira Nisrina Setyaningsih	07:35	17:00	WFO	- Review desain DEP dengan antara [illegible] - Melengkapi kelengkapan [illegible] - Membuat alternatif/[illegible] dan [illegible]
Jumat	23/09/2022	Adira Nisrina Setyaningsih	07:20	16:30	WFO	Desain buku IHPD, Ngecek dokumen, test app [illegible]
Sabtu	24/09/2022	Adira Nisrina Setyaningsih				
Minggu	25/09/2022	Adira Nisrina Setyaningsih				
Senin	26/09/2022	Adira Nisrina Setyaningsih			WFH	Melanjutkan desain buku IHPD
Selasa	27/09/2022	Adira Nisrina Setyaningsih	07:26	17:00	WFO	Melanjutkan desain IHPD, Mengecek & memperbaiki dokumen DEP, Membuat resume SAP
Rabu	28/09/2022	Adira Nisrina Setyaningsih	07:20	17:00	WFO	Melanjutkan resume SAP, buat desain IHPD
Kamis	29/09/2022	Adira Nisrina Setyaningsih	07:30	17:00	WFO	Melanjutkan desain IHPD - Membuat proposal PZ (program pemerintah pemerintah)
Jumat	30/09/2022	Adira Nisrina Setyaningsih	07:20	17:00	WFO	- Melanjutkan resume SAP

Hari	Tanggal	Nama	Absen Pagi	Absen Sore	Keterangan	Kegiatan
Sabtu	01/10/2022	Adira Nisrina Setyaningsih				
Minggu	02/10/2022	Adira Nisrina Setyaningsih				
Senin	03/10/2022	Adira Nisrina Setyaningsih			WFH	- Resume PSAP
Selasa	04/10/2022	Adira Nisrina Setyaningsih	07:40	17:00	WFO	- Resume PSAP 05, Membuat PPT PSAP 05 + Reviu Kegiatan Selasa, Membuat Membuat PPT
Rabu	05/10/2022	Adira Nisrina Setyaningsih	07:45	17:00	WFO	- Desain buku IHPD
Kamis	06/10/2022	Adira Nisrina Setyaningsih	07:50	16:30	WFO	- Melanjutkan desain IHPD - Mencari proposal program pemerintah
Jumat	07/10/2022	Adira Nisrina Setyaningsih			WFH	- Resume PSAP
Sabtu	08/10/2022	Adira Nisrina Setyaningsih				
Minggu	09/10/2022	Adira Nisrina Setyaningsih				
Senin	10/10/2022	Adira Nisrina Setyaningsih			WFH	- Resume PSAP, Membuat PPT PSAP 05
Selasa	11/10/2022	Adira Nisrina Setyaningsih	07:30	17:00	WFO	- Desain cover buku IHPD, melanjutkan resume PSAP
Rabu	12/10/2022	Adira Nisrina Setyaningsih	07:42	17:00	WFO	- Melanjutkan resume PSAP dan desain cover buku IHPD
Kamis	13/10/2022	Adira Nisrina Setyaningsih	07:50	17:00	WFO	- "
Jumat	14/10/2022	Adira Nisrina Setyaningsih	08:00	17:00	WFO	- Stock opname Perpus
Sabtu	15/10/2022	Adira Nisrina Setyaningsih				
Minggu	16/10/2022	Adira Nisrina Setyaningsih				
Senin	17/10/2022	Adira Nisrina Setyaningsih	07:58	17:00	WFO	- Stock opname
Selasa	18/10/2022	Adira Nisrina Setyaningsih	08:00	17:00	WFO	- Stock opname
Rabu	19/10/2022	Adira Nisrina Setyaningsih	08:10	17:00	WFO	- Stock opname, cap No Tiket, menempel label
Kamis	20/10/2022	Adira Nisrina Setyaningsih	08:00	17:00	WFO	- Stock opname
Jumat	21/10/2022	Adira Nisrina Setyaningsih			WFH	- Klasifikasi + Membuat poster giat reading day
Sabtu	22/10/2022	Adira Nisrina Setyaningsih				
Minggu	23/10/2022	Adira Nisrina Setyaningsih				
Senin	24/10/2022	Adira Nisrina Setyaningsih	08:00	16:30	WFO	- Stock opname
Selasa	25/10/2022	Adira Nisrina Setyaningsih	08:00	17:00	WFO	- Klasifikasi Komponen E
Rabu	26/10/2022	Adira Nisrina Setyaningsih	08:00	17:00	WFO	- Stock opname
Kamis	27/10/2022	Adira Nisrina Setyaningsih	08:00	12:00	WFO	- Stock opname (izin [illegible] 2 jam)
Jumat	28/10/2022	Adira Nisrina Setyaningsih			WFH	
Sabtu	29/10/2022	Adira Nisrina Setyaningsih				
Minggu	30/10/2022	Adira Nisrina Setyaningsih				
Senin	31/10/2022	Adira Nisrina Setyaningsih	08:10	17:00	WFO	- Stock opname + Klasifikasi

Mengetahui,

Mentor

Farida Sofia Irawati S.E., Ak., M.Acc

Hari	Tanggal	Nama	Absen Pagi	Absen Sore	Keterangan	Kegiatan
Selasa	01/11/2022	Adira Nisrina Setyaningsih	08.05	17:00	WFO	Klasifikasi Komponen Stock opname
Rabu	02/11/2022	Adira Nisrina Setyaningsih	08.10	17:00	WFO	"
Kamis	03/11/2022	Adira Nisrina Setyaningsih	08.00	17:00	WFO	"
Jumat	04/11/2022	Adira Nisrina Setyaningsih			WFH	
Sabtu	05/11/2022	Adira Nisrina Setyaningsih				
Minggu	06/11/2022	Adira Nisrina Setyaningsih				
Senin	07/11/2022	Adira Nisrina Setyaningsih			WFH	
Selasa	08/11/2022	Adira Nisrina Setyaningsih	08.10	17:00	WFO	Bikin 30 soal pilihan ganda SMP + Kegiatan
Rabu	09/11/2022	Adira Nisrina Setyaningsih	08.00	17:00	WFO	"
Kamis	10/11/2022	Adira Nisrina Setyaningsih	07.00	16:00	WFO	Upacara hari pahlawan + bikin 13 soal buttek 17
Jumat	11/11/2022	Adira Nisrina Setyaningsih			WFH	
Sabtu	12/11/2022	Adira Nisrina Setyaningsih				
Minggu	13/11/2022	Adira Nisrina Setyaningsih				
Senin	14/11/2022	Adira Nisrina Setyaningsih	08.00	17:00	WFO	laporan tengah magang.
Selasa	15/11/2022	Adira Nisrina Setyaningsih	08.00	12:00	WFO	" , Bimbingan dan
Rabu	16/11/2022	Adira Nisrina Setyaningsih	08.00	17:00	WFO	Melengkapi Komponen Klasifikasi perpus
Kamis	17/11/2022	Adira Nisrina Setyaningsih	08.00	17:00	WFO	"
Jumat	18/11/2022	Adira Nisrina Setyaningsih			WFH	"
Sabtu	19/11/2022	Adira Nisrina Setyaningsih				
Minggu	20/11/2022	Adira Nisrina Setyaningsih				
Senin	21/11/2022	Adira Nisrina Setyaningsih	[illegible]		WFH	Melanjutkan tugas P2
Selasa	22/11/2022	Adira Nisrina Setyaningsih	08.00	17.00	WFO	Membandingkan Baru pusat dgn cek fisik
Rabu	23/11/2022	Adira Nisrina Setyaningsih	08.10	17:00	WFO	"
Kamis	24/11/2022	Adira Nisrina Setyaningsih	08.00	17:00	WFO	Melanjutkan tugas P2
Jumat	25/11/2022	Adira Nisrina Setyaningsih			WFH	Melanjutkan tugas P2
Sabtu	26/11/2022	Adira Nisrina Setyaningsih				
Minggu	27/11/2022	Adira Nisrina Setyaningsih				
Senin	28/11/2022	Adira Nisrina Setyaningsih	08.15	17.00	WFO	Mengerjakan laporan akhir magang
Selasa	29/11/2022	Adira Nisrina Setyaningsih	08.00	17.00	WFO	Mengelesaikan tugas P2
Rabu	30/11/2022	Adira Nisrina Setyaningsih	08.00	17.30	WFO	Mengelesaikan tugas P2

Hari	Tanggal	Nama	Absen Pagi	Absen Sore	Keterangan	Kegiatan
Kamis	01/12/2022	Adira Nisrina Setyaningsih	08.00	17.30	WFO	Mengelesaikan tugas P2
Jumat	02/12/2022	Adira Nisrina Setyaningsih	08.00	17.00	WFO	Mengelesaikan tugas P2
Sabtu	03/12/2022	Adira Nisrina Setyaningsih				
Minggu	04/12/2022	Adira Nisrina Setyaningsih				
Senin	05/12/2022	Adira Nisrina Setyaningsih				

Mengetahui,

Mentor

Farida Sofia Irawati S.E., Ak., M.Acc

QR CODE KEGIATAN

QR Code Google Drive :

QR Code Canva :